

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.2.21.12.21.305 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang digunakan sebagai acuan perencanaan kinerja Sekretariat Utama harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan, perlu dilakukan reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 3 -

- Kedua : Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan di lingkungan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2021

PLT. SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



ELIN HERLINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02.2.21.12.21.305 TAHUN 2021  
TENTANG  
REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN  
2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

BPOM telah melakukan Reviu Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja BPOM hingga akhir Tahun 2024. Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 dilakukan guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 serta adanya pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Sebagai tindaklanjut terhadap Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024, Unit Organisasi dan Satuan Kerja di Lingkungan BPOM perlu melakukan reviu terhadap Rencana Strategis Unit Organisasi masing-masing untuk menjaga keselarasan perencanaan BPOM dengan Unit Organisasi di bawahnya. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai Unit Organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung tugas-tugas utama BPOM sebagai pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama perlu melakukan reviu terhadap Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Penyusunan Reviu Renstra Sekretariat Utama ini berpedoman pada Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan khususnya terkait tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Utama. Reviu

Renstra Sekretariat Utama ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Utama sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## B. TUJUAN

Tujuan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Sekretariat Utama BPOM;
2. dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024; dan
3. bagi seluruh unit organisasi Eselon II di lingkungan Sekretariat Utama BPOM dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah:

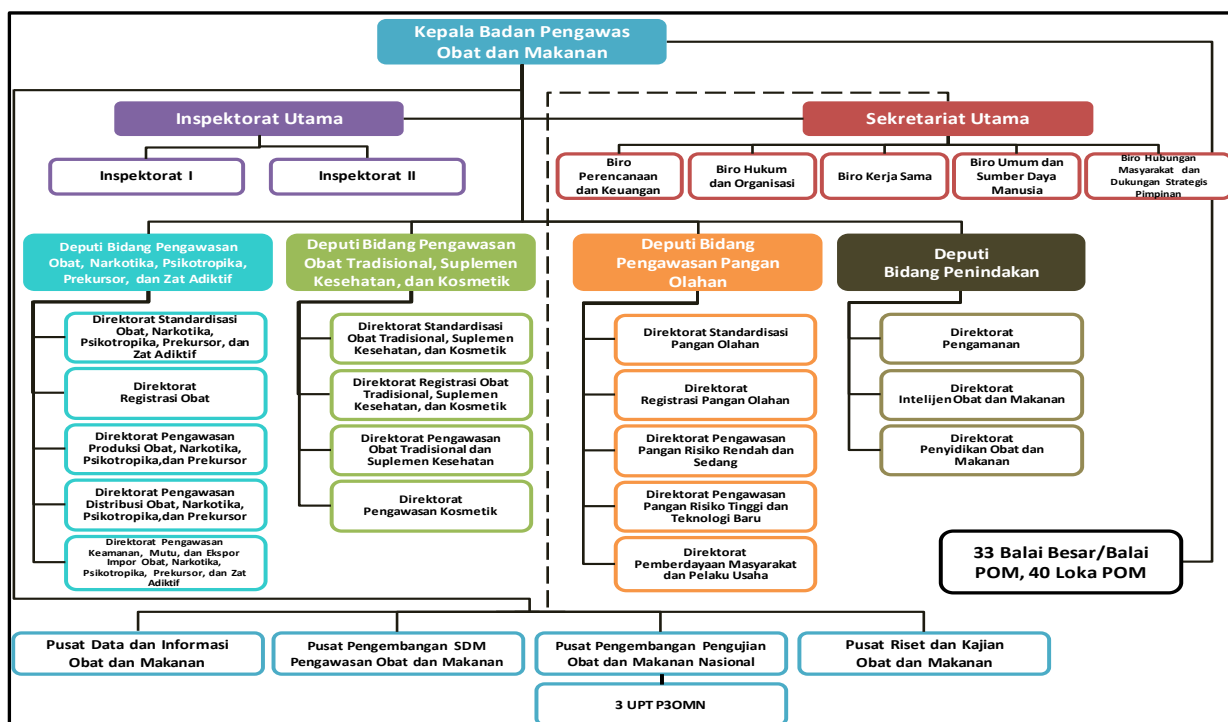
1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Sekretariat Utama BPOM; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

BAB II  
HASIL REVIU RENCANA STRATEGI SEKRETARIAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

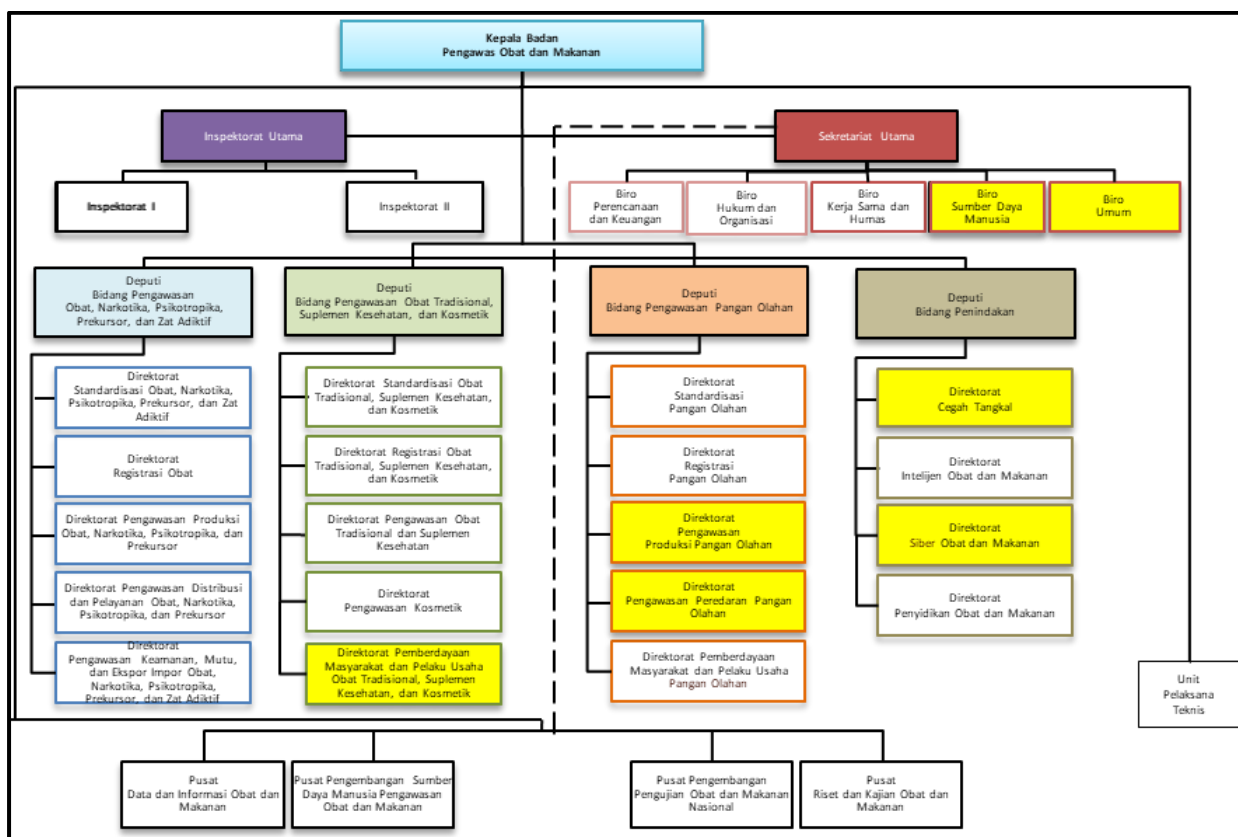
**A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan**

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM

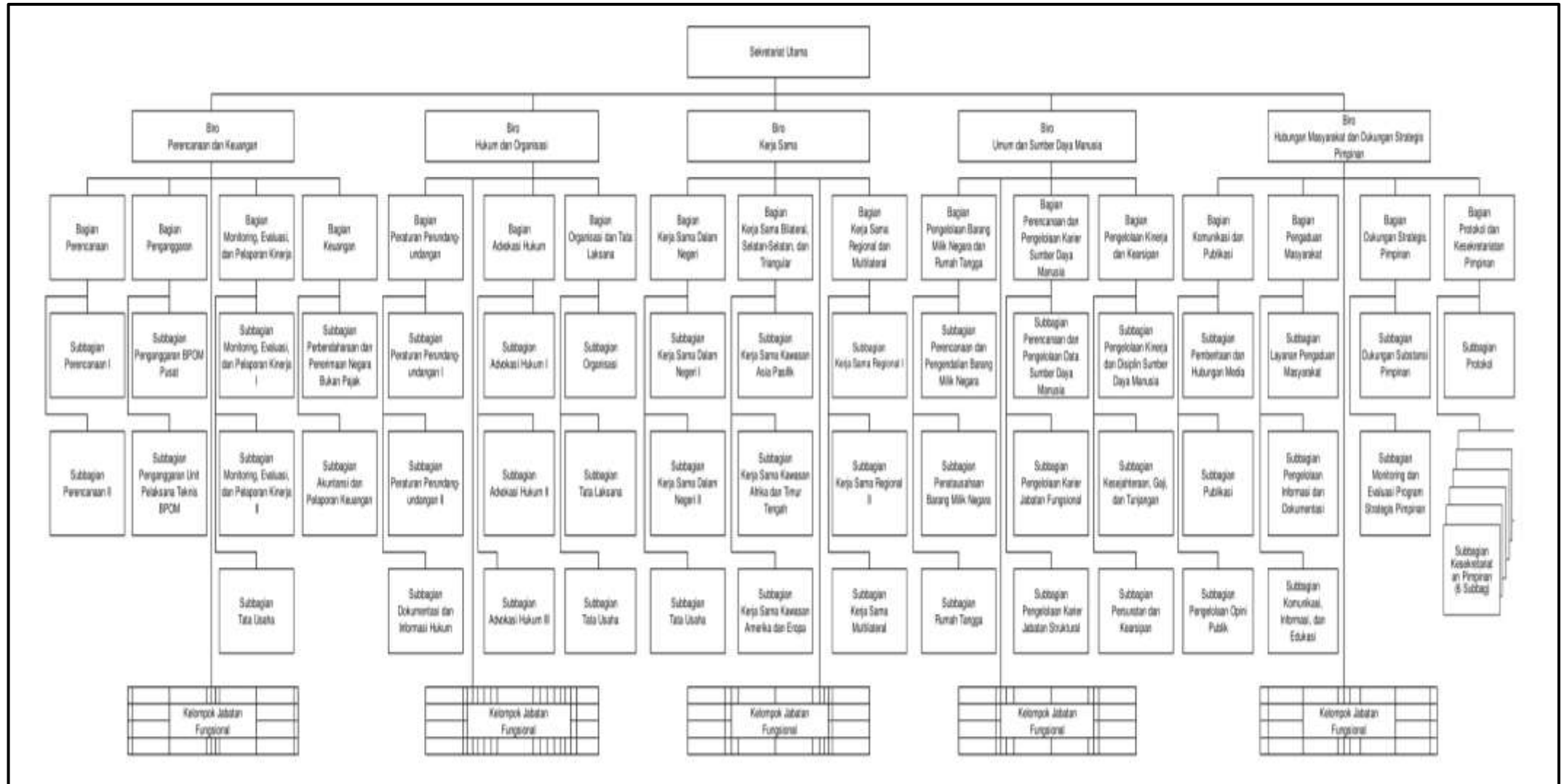
Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, berdampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan BPOM termasuk adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan Sekretariat Utama. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud, sebagai berikut:



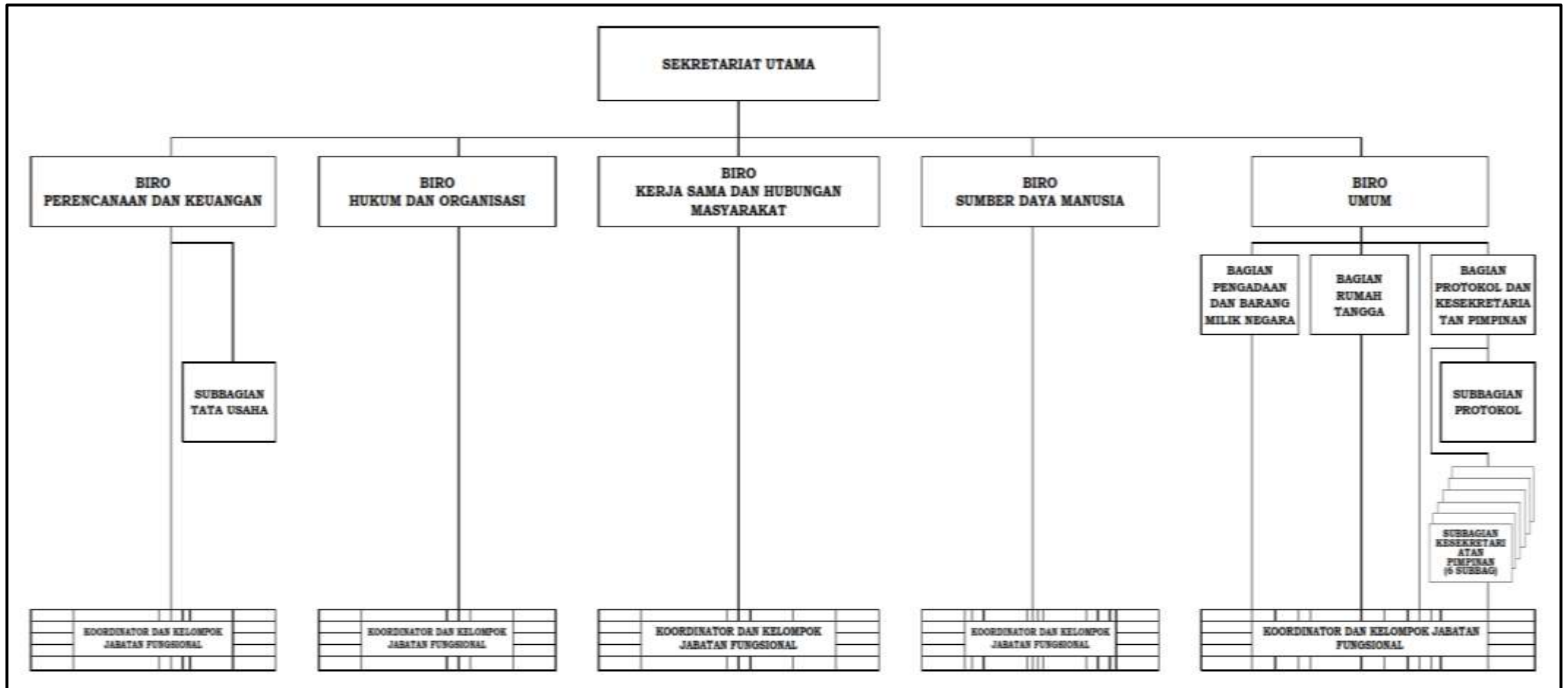
**Gambar 1. Struktur Organisasi BPOM (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM**



**Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM**



**Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Utama BPOM (Semula) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM**



**Gambar 4. Struktur Organisasi Sekretariat Utama BPOM (Menjadi) Mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM**

Berdasarkan gambar 1-4 di atas, secara lebih rinci dapat dijelaskan perubahan organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama BPOM sebagai berikut:

- a. Penghapusan “Biro Humas dan DSP” dan memindahkan fungsi yang ada di dalamnya kepada 3 (tiga) Biro sesuai OTK baru, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Kerja Sama dan Humas serta Biro Hukum dan Organisasi.
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan  
Terdapat penambahan fungsi Dukungan Strategis Pimpinan yang sebelumnya terdapat pada Biro Humas DSP.
- c. Biro Hukum dan Organisasi  
Terdapat penambahan fungsi pengelolaan pengaduan masyarakat yang sebelumnya terdapat pada Biro Humas DSP.
- d. Perubahan nomenklatur “Biro Kerja Sama” menjadi “Biro Kerja Sama dan Humas” dengan penambahan fungsi humas yang sebelumnya terdapat pada Biro Humas dan DSP.
- e. Pemisahan Biro Umum dan SDM menjadi 2 (dua) Unit Kerja yaitu Biro Umum dan Biro Sumber Daya Manusia.

Implikasi yang paling mendasar terhadap perubahan OTK Sekretariat Utama tersebut adalah terkait sasaran strategis dan indikator kinerja di Lingkup Sekretariat Utama, mulai dari level organisasi Eselon I dan unit kerja Eselon II di bawahnya. Untuk itu, dilakukan reviu terhadap peta strategi Level 1 dan 2 di Lingkungan Sekretariat Utama BPOM sesuai OTK baru.

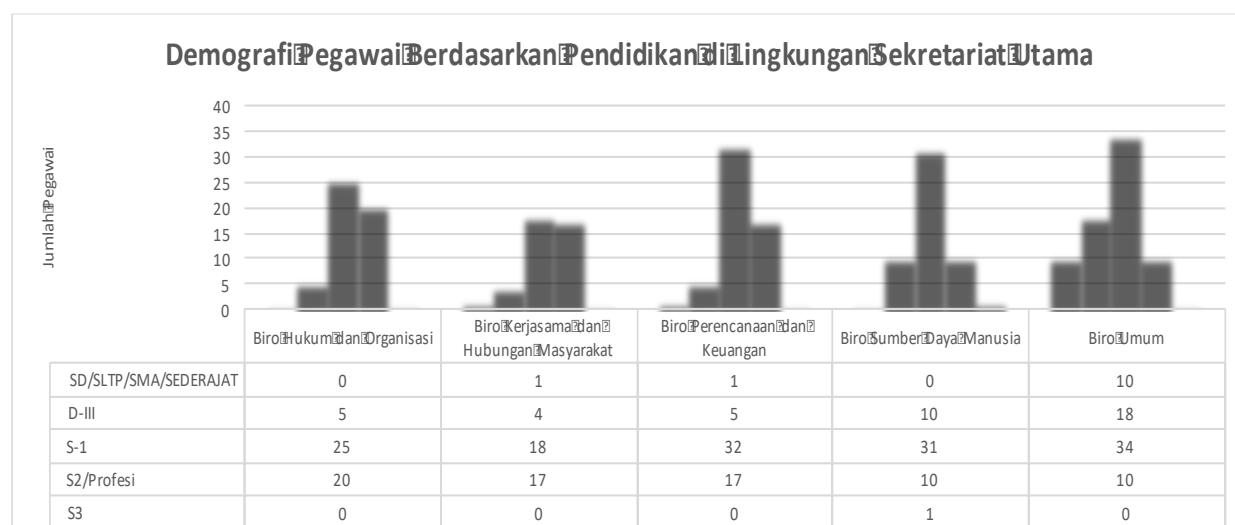
2. Reviu Kebutuhan Sumber Daya Manusia berdasarkan Analisis Beban Kerja  
Pada Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, telah dilakukan pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Utama secara memadai pada saat itu dibutuhkan pegawai sebanyak 648 orang. Seiring dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 khususnya organisasi Sekretariat Utama serta berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM Sekretariat Utama. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Sekretariat Utama untuk melaksanakan tugas dan fungsi per 10 Desember 2021 sejumlah 269 orang dengan proporsi 60% perempuan dan 40% laki-laki. Jumlah SDM Sekretariat Utama tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama secara optimal. Setelah dilakukan reviu kebutuhan pegawai di Lingkungan Sekretariat Utama Pada Tahun 2021 dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis

dalam mewujudkan SMART ASN yang mendukung transformasi birokrasi digital di era revolusi industry 4.0 terdapat perubahan pada analisa beban kerja. Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM sampai dengan Tahun 2024 diperoleh ABK sebanyak 571 orang pegawai dengan membandingkan jumlah pegawai per Desember 2021 adalah sebesar 269 orang pegawai. Maka dibutuhkan tambahan pegawai sebanyak 302 orang pegawai pada tahun 2021. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama.

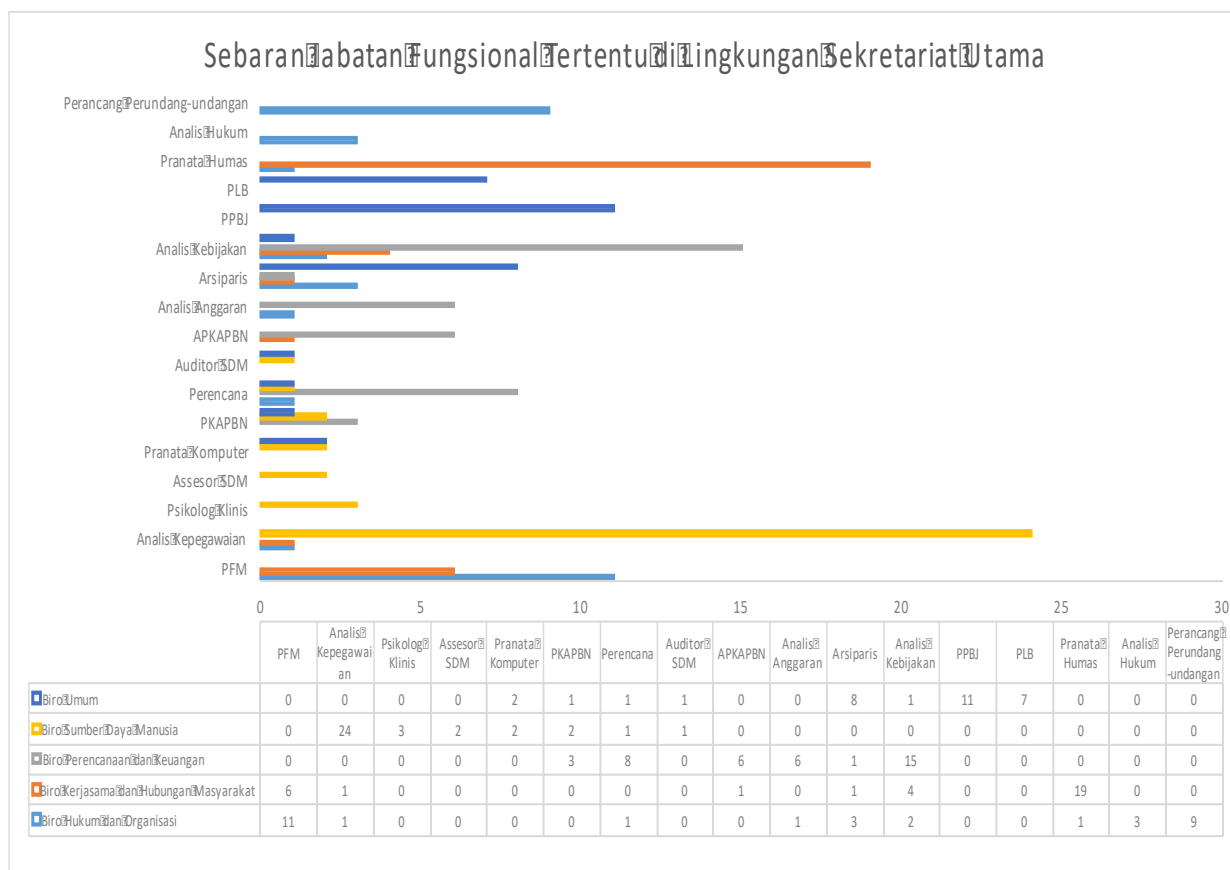
**Tabel 1. Jumlah Pegawai Eksisting dan Jumlah Kebutuhan Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)**

| No.          | Unit Kerja                              | ABK        | Eksisting  | Gap        | % Pemenuhan |
|--------------|---|------------|------------|------------|-------------|
| 1            | Sekretariat Utama                       | 1          | 0          | 1          | 0%          |
| 2            | Biro Hukum dan Organisasi               | 130        | 50         | 80         | 38%         |
| 3            | Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | 107        | 40         | 67         | 37%         |
| 4            | Biro Perencanaan dan Keuangan           | 117        | 55         | 62         | 47%         |
| 5            | Biro Sumber Daya Manusia                | 107        | 52         | 55         | 49%         |
| 6            | Biro Umum                               | 109        | 72         | 37         | 66%         |
| <b>Total</b> |   | <b>571</b> | <b>269</b> | <b>302</b> | <b>47%</b>  |

Pada Tahun 2021 dapat diketahui bahwa dari sebanyak 269 orang terdapat 30 orang pegawai berpendidikan profesi, 140 orang berpendidikan S1, 44 orang berpendidikan S2, dan 1 orang yang berpendidikan S3. Pegawai dengan pendidikan Non Sarjana sebanyak 54 orang.



**Gambar 5. Profil Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



**Gambar 6. Sebaran Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Utama**

Pada Tahun 2021 sebaran jabatan di lingkungan Sekretariat Utama terdiri dari 15 orang pegawai Jabatan Struktural, 170 orang pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, dan 84 orang pegawai Jabatan Fungsional Umum.

3. Capaian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra Sekretariat Utama BPOM 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Utama Tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020**

| IKU  | 2020   |           |             |
|--|--------|-----------|-------------|
|  | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| <b>Sasaran Strategis I: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama</b> |        |           |             |
| Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama  | 41     | 40.35*    | 98.41       |
| Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama  | 73.25  | 70.67     | 96.48       |
| Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM   | WTP    | WTP       | 100         |
| Nilai Kinerja Anggaran BPOM  | 93     | 95.37     | 102.54      |

| IKU   | 2020   |           |             |
|---|--------|-----------|-------------|
|   | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| <b>Sasaran Strategis II: Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama</b>                 |        |           |             |
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi   | 79.5   | 85.3      | 107.30      |
| Indeks Kepuasan Media   | 73     | 74.02     | 101.40      |
| Indeks Opini Publik BPOM  | 66     | 79.6      | 120.61      |
| Indeks kepuasaan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen  | 3.70   | 3.80      | 102.70      |
| <b>Sasaran Strategis III: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan</b>                  |        |           |             |
| Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100    | 100       | 100         |
| <b>Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya BPOM</b>  |        |           |             |
| Nilai Pengelolaan BMN   | 80     | 79        | 98.75       |
| Presentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal   | 78     | 92.90     | 119.10      |
| Presentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal  | 81     | 96.34     | 118.94      |
| <b>Sasaran Strategis V: Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran</b>  |        |           |             |
| Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan  | 100    | 100       | 100         |
| Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015   | 79     | 79        | 100         |
| <b>Sasaran Strategis VI: Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum</b>  |        |           |             |
| Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan   | 100    | 100       | 100         |
| Persentase advokasi hukum yang efektif  | 82     | 96.43     | 117.60      |
| <b>Sasaran Strategis VII: Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif</b>   |        |           |             |
| Persentase kerjasama yang efektif   | 82     | 91.67     | 111.79      |
| <b>Sasaran Strategis VIII: Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama</b>                                    |        |           |             |
| Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media   | 99.59  | 99.84     | 100.25      |
| Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti   | 99     | 99.47     | 100.48      |
| Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama  | 96.32  | 91.00     | 102.27      |
| Indeks Pelayanan Publik   | 3.91   | 4.48      | 114.58      |
| <b>Sasaran Strategis IX: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang Optimal</b>   |        |           |             |
| Indeks RB Sekretariat Utama   | 85     | 73.75     | 86.76       |
| Nilai AKIP Sekretariat Utama  | 81     | 80.69     | 99.62       |
| <b>Sasaran Strategis X: Terwujudnya SDM dilingkup Sekretariat Utama yang berkinerja optimal</b>   |        |           |             |
| Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama   | 78     | 77.37     | 99.19       |
| <b>Sasaran Strategis XI: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama</b>                                     |        |           |             |
| Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik  | 1.51   | 0.2       | 13.25       |

| IKU  | 2020   |           |             |
|--|--------|-----------|-------------|
|  | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| <b>Sasaran Strategis XII: Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama secara Akuntabel</b> |        |           |             |
| Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama   | 93     | 91.47     | 98.35       |
| Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama                                | 100    | 75        | 75          |

Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Utama pada tahun 2020, dari 27 (dua puluh tujuh) Indikator, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori sangat kurang (<50) yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik (13,25%); 2 (dua) indikator dengan kategori cukup (70-<90) yaitu 1) Indeks RB Sekretariat Utama (84,18%) dan 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama (75,00%); 18 (delapan belas) indikator dengan kategori baik (90-<110) yaitu 1) Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama (98,41%), 2) Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama (96,48%), 3) Opini BPK atas laporan keuangan BPOM (100%), 4) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (102,54%), 5) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (107,3%), 6) Indeks Kepuasan Media (101,4%), 7) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (102,65%), 8) Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (100%), 9) Nilai Pengelolaan BMN (98,75%), 10) Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (100%), 11) Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (100%), 12) Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (100%), 13) Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (100,25%), 14) Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (100,48%), 15) Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama (102,27%), 16) Nilai AKIP Sekretariat Utama (99,62%), 17) Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama (99,19%), dan 18) Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (98,35%); 5 (lima) indikator dengan kategori sangat baik (110-120) yaitu 1) Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal (119,10%), 2) Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal (118,93%), 3) Persentase Advokasi Hukum yang efektif (117,60%), 4) Persentase kerja sama yang efektif (111,79%) dan 5) Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama (114,58%); dan 1 (satu) indikator dengan kategori tidak dapat disimpulkan yaitu Indeks Opini Publik BPOM (120,61%).

Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Utama pada tahun 2020 yang perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya adalah indikator dengan kategori kurang dan cukup, yaitu:

- a. Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik dengan karena masih rendahnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai, email unit dan pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC serta verifikasi/pemutakhiran BOC. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit secara intensif; pemanfaatan (login dan akses) dashboard BOC sebanyak 20 kali dalam sebulan; dan verifikasi/pemutakhiran BOC minimal 1 kali dalam sebulan.
- b. Indeks RB Sekretariat Utama karena belum menetapkan pola mutasi internal dan penerapan sistem punishment (sanksi)/reward bagi pemberi layanan dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan belum optimal.
- c. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama karena rendahnya capaian Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik dan rendahnya Indeks RB Sekretariat Utama.

Sedangkan capaian Indikator Kinerja Sekretariat Utama pada tahun 2020 yang perlu dilakukan review kembali dalam penetapan target ke depan adalah Indikator dengan capaian lebih dari 110%, yaitu:

- a. Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal karena telah dilakukan coaching clinic dan FGD pengelolaan BMN serta pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja dan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19
- b. Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal karena telah dilakukan Pengisian jabatan struktural; Pengangkatan pertama jabatan fungsional yaitu Analis Kebijakan, Perancang undang-undang, PPBJ, Analis Anggaran, Perencana dan Auditor Kepegawaian; Penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional melalui inpasing dan pengangkatan kembali; serta pendampingan, Monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja.
- c. Persentase Advokasi Hukum yang efektif karena adanya koordinasi penanganan kasus/perkara/tuntutan hukum di lingkungan BPOM dan stakeholder eksternal; fasilitasi dan pendampingan hukum pemberian keterangan saksi/ahli; serta konsultasi dan penyuluhan hukum.
- d. Persentase kerja sama yang efektif karena kerja sama dalam dan luar negeri BPOM telah diimplementasikan; serta institusi penerima bantuan telah menerapkan rekomendasi program KSS BPOM.

- e. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama karena adanya peningkatan kualitas pelayanan publik serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
- f. Indeks Opini Publik BPOM disebabkan Penyampaian informasi tentang Obat dan Makanan melalui berbagai media terutama jika terdapat hoaks gencar dilakukan BPOM, terutama selama pandemi COVID-19; serta penjelasan/klarifikasi berita oleh BPOM diamplifikasi oleh berbagai penggiat media sosial seperti influencer dan Blogger.

Selain kinerja yang disajikan dalam matriks di atas, Sekretariat Utama juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung pencegahan, penularan dan penanganan pandemi Covid19, antara lain:

- a. Pengadaan fasilitas sarana prasarana untuk pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan kantor untuk pegawai BPOM, yaitu melalui pengadaan *thermoscanner, nebulizer*, suplemen peningkatan imunitas pegawai, *rapid test kit, handsanitizer*, penambah daya tahan tubuh, dan masker;
- b. Penyediaan dan perbaikan fasilitas *hygiene* sanitasi di lingkungan kantor BPOM, seperti pembuatan fasilitas cuci tangan, pemasangan *hand sanitizer* otomatis, dan penggantian kran cuci tangan otomatis;
- c. Kegiatan penyemprotan desinfektan secara berkala di seluruh Gedung kantor, kendaraan dinas pejabat, dan kendaraan operasional BPOM, dilakukannya swab massal dan rutin berdasarkan hasil *tracing* dan *tracking*;
- d. Pemberhentian aktivitas masjid, berupa penggulungan karpet masjid dan tidak menyediakan peminjaman alat ibadah bersama, serta pembagian shift untuk *security* dan *cleaning service* di lingkungan kantor BPOM;
- e. Adanya *Flexibel working arrangement (Work From Office dan Work From Home)* untuk pegawai di Lingkungan BPOM, Sistem Informasi SDM dalam layanan kepegawaian berbasis digital, Dukungan pencegahan covid (Sosialisasi protocol Kesehatan, vaksinasi pegawai, dll), penyelenggaraan psikoedukasi dalam menghadapi pekerjaan di masa pandemi, penyelenggaraan klinik psikologi secara online dapat diakses oleh seluruh pegawai dan penggunaan aplikasi e-presensi sebagai system pencatatan kehadiran pegawai;
- f. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Sekretariat Utama telah melakukan inisiasi, koordinasi serta kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri serta forum internasional, antara lain:
  - 1) Kerja sama dalam rangka percepatan ketersediaan bahan obat, obat dan vaksin COVID-19, antara lain:

- a) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Dit. Asia Selatan dan Tengah dan KBRI New Delhi) dan Industri Farmasi dalam memfasilitasi pemasukan Bahan Baku Obat (BBO), termasuk BBO untuk penanganan COVID-19 dari India yang terkendala akibat adanya kebijakan pelarangan ekspor dan situasi *lockdown* di India.
- b) Melakukan koordinasi partisipasi aktif BPOM pada pertemuan *World Health Assembly* (WHA) ke-73 yang membahas mengenai isu COVID-19 dan menekankan pentingnya langkah terpadu, sinergis dan komprehensif secara global dalam penanganan COVID-19.
- c) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan terkait dukungan pada forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN terkait Vaksin Global secara virtual.
- d) Memfasilitasi Pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas akses produk farmasi dan alat Kesehatan dalam kerangka COVID-19, termasuk pembahasan akses Remdesivir Gilead;
- e) Memfasilitasi pertemuan peninjauan kerja sama Vaksin COVID-19 antara PT. Bio Farma dengan CEPI (*Coalition for Epidemic Preparedness Innovations*);
- f) Memfasilitasi kolaborasi antara BPOM dengan Sinovac Biotech Ltd., Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN dan Bio Farma dalam rangka mencapai kesepakatan kerja sama pengembangan dan penelitian vaksin COVID-19 antara Sinovac dan PT. Bio Farma, termasuk rencana uji klinik fase 3 di Indonesia;
- g) Memfasilitasi kerja sama BPOM dengan KBRI Tokyo-Jepang dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Pekerja dan *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency* (PMDA) Jepang terkait pemasukan Obat Avigan (Favipiravir) ke Indonesia.
- h) Berpartisipasi aktif dalam *Workshop virtual Expediting Regulatory Pathway for Approval COVID-19 Vaccines in Countries South East Asia Region*.
- i) Memfasilitasi pertemuan COVAX Facility melalui koordinasi dengan WHO-COVAX untuk mendapatkan data mengenai dossier vaksin COVID-19 yang mendapatkan EUL dari WHO dalam rangka penerbitan EUA vaksin COVID-19 yang diterima Indonesia dalam skema COVAX.

- j) Memfasilitasi Kerja Sama dengan WHO dalam kerangka WHO *Joint Workplan* dengan salah satu program yaitu Pelatihan *Clinical Trial Covid-19*.
  - k) Memfasilitasi Kolaborasi NMRAs Negara OKI dalam Meningkatkan Ketersediaan Obat dan Vaksin COVID-19 melalui penyelenggaraan workshop virtual OKI
  - l) Memfasilitasi *Pertemuan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)*, yang membahas dan memberikan rekomendasi kepada WHO terkait berbagai kebijakan dan strategi global, baik terkait vaksin, teknologi, R and D, serta program imunisasi/vaksinasi termasuk vaksin COVID-19.
  - m) Memfasilitasi Pertemuan Regional Vaccine Advisory Group (RVAG) ADB, yang merupakan platform kolaborasi regional Asia Pasifik, terutama negara berkembang, membahas dan memberikan rekomendasi kepada ADB terkait mutu, keamanan dan efikasi vaksin COVID-19 serta pertukaran informasi terkait COVID-19 vaccine dossier, best practices terkait penilaian dan surveillans keamanan dan efektifitas vaksin COVID-19.
- 2) Kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas BPOM dalam penanganan COVID-19, antara lain:
- a) Kerja sama dengan Tim Representatif WHO di Jakarta dan Balitbangkes, Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan *capacity building* berupa *virtual training* untuk pengujian COVID-19 menggunakan PCR dan *training biosafety*.
  - b) Kerja sama dengan *Therapeutic Goods Administration (TGA)* Australia dalam penyelenggaraan pelatihan Laboratorium melalui webinar
- 3) Melakukan koordinasi kerja sama bilateral BPOM dengan ANIVISA (*Agência Nacional de Vigilância Sanitária*), Brazil dan dengan ISP, Chile dalam rangka penanganan COVID-19.
- 4) Memfasilitasi pembahasan dengan Badan Otoritas Obat dalam pengembangan vaksin COVID-19, antara lain dengan Pemerintah Turki, Kementerian Kesehatan UEA, MHLW dan PMDA, *National Medical Products Administration-RRT*, serta Partisipasi BPOM dalam the 3rd Asian Meeting Network bersama regulator negara mitra (Jepang, Korea, China, Malaysia, Singapore, Philipines, Vietnam).
- 5) Fasilitasi kerja sama dalam negeri untuk percepatan pemeriksaan uji COVID-19 dengan memanfaatkan sarana laboratorium BPOM, antara lain kerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Universitas Bengkulu, Pemerintah Provinsi Gorontalo serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 6) Fasilitasi kerja sama antara Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, BPOM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Universitas Gadjah Mada, PT. Saka Farma Laboratories, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tentang Penelitian dan Pengembangan Kandidat Immunomodulator dari Produk Herbal dalam Penanganan COVID-19.
- 7) Penguatan komunikasi internal dan eksternal untuk amplifikasi pesan dukungan BPOM dalam penanganan pandemi COVID-19, antara lain:
  - a) Publikasi di media sosial BPOM berupa konten promosi protokol kesehatan dan ayo vaksin, serta edukasi terkait konsumsi produk Obat dan Makanan yang aman selama pandemi, termasuk informasi terkini terkait peran BPOM dalam penanganan pandemi seperti penerbitan *Emergency Use of Authorization (EUA)* Vaksin, klarifikasi hoaks, dan lainnya.
  - b) Publikasi informasi publik mengenai obat dan vaksin di berbagai media publik.
  - c) Kerja sama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk penanganan pesan hoaks terkait Obat dan Makanan melalui penyebaran informasi/klarifikasi BPOM kepada media yang tergabung dalam tim cek fakta.
  - d) Peningkatan komunikasi dengan media untuk informasi yang harus diketahui publik secara luas dengan segera dalam bentuk konferensi pers, siaran/penjelasan pers, dan *public warning*.
- g. Telah diterbitkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman penanganan Covid-19 antara lain:
  - 1) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.122 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 2019 BPOM.
  - 2) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.03.20.126 Tahun 2020 tentang Penyederhanaan Persyaratan Izin Edar dan Surat keterangan Impor Produk Gula Kristal Putih untuk Percepatan Penyediaan Bahan Pokok Selama Masa Pandemi Covid 19.
  - 3) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.20.134 Tahun 2020 tentang Penetapan Pedoman Obat dalam Penanganan Covid 19.

- 4) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.04.20.153 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan di Gorontalo untuk melaksanakan Pemeriksaan Uji Covid 19.
- 5) Keputusan Kepala Badan POM tentang Penugasan kepada 12 (dua belas) BBPOM/Balai POM untuk melaksanakan Pemeriksaan Covid 19.
- 6) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.06.20.182 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan BPOM.
- 7) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.01.1.2.08.20.338 Tahun 2020 tentang Penetapan Pedoman Pelayanan Publik dan Pengawasan Obat Selama Pandemi Covid 19.
- 8) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.11.20.1126 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Darurat (*Emergency Use Authorization*) dan beberapa perubahannya pada Tahun 2021.
- 9) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK. 02.02.1.2.08.21.348 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan Obat ke dalam Wilayah Indonesia pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid 19.

#### 4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, telah dilakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Sekretariat Utama dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar dapat berjalan optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Sekretariat Utama tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

##### **a. Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020 dengan perkembangan dan penularan yang begitu cepat hingga seluruh provinsi di Indonesia berdampak pada aspek kesehatan serta pada aspek kehidupan lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM dalam peningkatan peran dan upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Tidak terkecuali bagi Sekretariat Utama sebagai Unit Organisasi yang berperan dalam memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, adanya pandemi Covid-19 juga menjadi isu strategis dan tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi dengan berbagai strategi yang

tepat. Beberapa dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap tugas, fungsi serta peran Sekretariat Utama diantaranya:

- 1) Dalam pelaksanaan KIE masa pandemi covid-19 terkendala adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sehingga berdampak keterlambatan pelaksanaan KIE yang sudah disusun sesuai *plant of action*. Namun Sekretariat Utama melakukan strategi pelaksanaan dengan koordinasi antara unit kerja dan UPT BPOM terkait penyiapan dan penyediaan serta pelaksanaan KIE Obat dan Makanan dilakukan melalui media sosial, SMS *blast*, penayangan di videotron, penyediaan leaflet dan gimmick serta kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat baik secara langsung maupun daring/virtual dengan memberikan materi KIE berkaitan penanggulangan Covid-19.
- 2) Adanya Covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional dan kedaruratan kesehatan masyarakat, mengakibatkan munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang menjadikan upaya penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai prioritas nasional yang menjadi perhatian utama Pemerintah. Hal tersebut berdampak terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang dirancang oleh Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Keuangan, salah satunya adanya kebijakan pemotongan anggaran (APBN-P) K/L dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan PEN. BPOM sebagai K/L yang terdampak terhadap kebijakan pemotongan anggaran tersebut perlu mengantisipasinya dengan melakukan berbagai upaya, antara lain:
  - a) Reviu prioritas kinerja dan anggaran sesuai dengan kebijakan Nasional dan kebijakan Pimpinan BPOM.
  - b) Penyesuaian target baik output maupun kinerja baik untuk output dan indikator Prioritas Nasional (PN) maupun tidak.
  - c) Peningkatan koordinasi bersama suprasistem dalam rangka pengawalan target kinerja dan anggaran BPOM agar dapat memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19 secara proporsional.Keseluruhan hal tersebut merupakan tugas dan fungsi serta menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat Utama untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran kinerja yang berbasis program prioritas.

3) Adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan di masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdampak terhadap pola sistem kerja yang diterapkan oleh BPOM, yaitu melalui kebijakan *flexible working arrangement* (*Work From Office* dan *Work From Home*). Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat Utama, untuk mampu membangun pola sistem kerja di masa pandemi Covid-19 yang mampu menjamin seluruh pegawai tetap melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal serta memberikan pelayanan publik yang prima. Kebijakan tersebut tentunya harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai.

**b. Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)**

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran serta reformasi perencanaan dan penganggaran maka dilakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagai kebijakan baru yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mulai berlaku efektif untuk Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2021. Salah satu hal penting pada RSPP adalah dilakukannya penataan kembali terhadap keluaran (output) dengan mengelompokkan keluaran (output) yang sejenis serta menyeragamkan satuan dari keluaran (output) tersebut guna memastikan bahwa rumusan Keluaran (Output) yang disusun sesuai dengan definisi, konsep, dan ruang lingkup muatan Keluaran (Output) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L. Hasil dari penataan tersebut yaitu ditetapkannya Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang merupakan kumpulan atas keluaran (output) K/L (Rincian Output/RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis. Kebijakan ini perlu direspon dengan baik oleh BPOM khususnya melalui Sekretariat Utama dengan mengoordinasikan perumusan Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output RO pada Program dan Kegiatan BPOM sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Redesain Perencanaan dan Penganggaran K/L sehingga proses perencanaan dan penganggaran BPOM dapat berjalan sesuai ketentuan.

**c. Penyederhanaan Birokrasi**

Dengan ditetapkannya penyederhanaan birokrasi sebagai prioritas kerja pemerintah dan *quick wins* wajib bagi K/L pada periode tahun 2020 sampai dengan 2021, BPOM berkomitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi untuk terciptanya layanan publik yang prima. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) penyederhanaan struktur organisasi; 2) penyetaraan jabatan; dan 3) penyesuaian sistem kerja.

BPOM telah memulai penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di tahun 2020 dan secara efektif diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Penyederhanaan birokrasi tersebut dalam wujud antara lain penetapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan selanjutnya perlu diikuti dengan penyesuaian sistem kerja sehingga tujuan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang *agile*, fleksibel, dan kolaboratif yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dapat tercapai. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat meliputi evaluasi fungsi coordinator/subkoordinator, penyesuaian tata hubungan kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga penyempurnaan sistem kerja berbasis elektronik dengan optimalisasi penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

**d. Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan Ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya**

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja, Badan POM masuk dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan dan pengenaan sanksi. Undang Undang yang terkait yang masuk dalam UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sejalan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, telah disusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Badan POM masuk dalam sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan. Tujuan disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diselenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai amanat dari Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Badan POM telah menetapkan Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan. Dalam Peraturan Badan POM tersebut terdiri dari 4 (empat) subsektor standar dan persyaratan yaitu:

- a. Subsektor Obat;
- b. Subsektor Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika;
- c. Subsektor Pangan Olahan; dan
- d. Subsektor Ekpor dan Impor Obat dan Makanan.

BPOM telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan BPOM yang *existing* berlaku saat ini dan terdampak dengan adanya PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat Peraturan BPOM yang berpotensi untuk direvisi menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 antara lain Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara penerbitan perizinan di lingkungan BPOM, pedoman tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, dan standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM.

## **B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis**

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama** karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama serta amanah yang tertuang dalam Renstra BPOM 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama sebagai berikut:

**Tabel 3. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024**

|   |   |
|---|---|
| Visi Sekretariat Utama BPOM 2020-2024 (sama dengan Visi BPOM 2020-2024) | Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong  |
| Misi Sekretariat Utama BPOM 2020-2024                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan manajemen sumber daya untuk mewujudkan kelembagaan BPOM yang optimal, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta membangun SDM BPOM yang profesional dan berintegritas tinggi.</li><li>2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas regulasi dan advokasi hukum dalam rangka mewujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang handal.</li><li>3. Membangun kesadaran masyarakat dan kemitraan BPOM yang optimal.</li><li>4. Mewujudkan Unit Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional dan inovatif.</li></ol> |
| Tujuan Sekretariat Utama BPOM 2020-2024                                 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel;</li><li>2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi stakeholder Sekretariat Utama; dan</li><li>3. Terwujudnya Unit Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional dan inovatif.</li></ol>  |

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Sekretariat Utama BPOM 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja Sekretariat Utama, sebagai berikut:

**Tabel 4. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Sekretariat Utama 2020-2024**

| MISI  | TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR  | ARAH KEBIJAKAN   | STRATEGI   |
|---|---|--|--|--|--|
| <p>1. Meningkatkan manajemen sumber daya untuk mewujudkan kelembagaan BPOM yang optimal, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya serta membangun SDM BPOM yang profesional dan berintegritas tinggi.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas regulasi dan advokasi hukum dalam rangka mewujudkan Pengawasan Obat dan Makanan yang handal</p> <p>3. Membangun kesadaran masyarakat dan kemitraan BPOM yang optimal</p> | <p>1. Terwujudnya dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, efisien, dan akuntabel</p> | <p>1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM</p>  | <p>1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama</p> <p>2. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama</p> <p>3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM</p> <p>4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM</p> | <p>1. Peningkatan akuntabilitas kinerja BPOM, kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.</p> | <p>1. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan anggaran BPOM, serta organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat ukuran dan proses</p> |
|   |   | <p>2. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan</p> | <p>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar</p>                             |  |  |

| MISI | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR   | ARAH KEBIJAKAN  | STRATEGI   |
|------|--------|---|---|---|--|
|      |        | 3. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | 1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan<br>2. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015   |   |  |
|      |        | 4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM                    | 1. Nilai Pengelolaan BMN (2021)<br>2. Indeks Pengelolaan Aset (2022-2024)<br>3. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal (2020)<br>4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (2021-2024)<br>5. Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal (2020)<br>6. Indeks Sistem Merit (2021-2024) | 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM BPOM serta optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana BPOM | 2. Peningkatan kualitas pengelolaan SDM berbasis sistem merit dan sumber daya lain termasuk sarana prasana penunjang kinerja secara akuntabel, efektif, dan efisien dalam rangka kinerja pengawasan dan pelayanan publik yang prima. |

| MISI | TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR  | ARAH KEBIJAKAN   | STRATEGI   |
|------|---|---|--|--|--|
|      |   | 5. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum  | 1. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan<br>2. Persentase Advokasi Hukum yang efektif  | 3. Peningkatan kualitas dan efektifitas regulasi dan advokasi hukum dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.  | 3. Peningkatan kualitas kebijakan/regulasi BPOM yang implementatif sesuai kebutuhan publik serta penguatan advokasi hukum dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal |
|      |   | 6. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif                                    | 1. Persentase kerja sama yang efektif<br>2. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media<br>3. Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (2021-2024) | 4. Penguatan dukungan koordinasi dan kerjasama BPOM dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penguatan peran dan posisi BPOM di dunia internasional. | 4. Penguatan efektivitas kerjasama BPOM bersama lintas sektor baik nasional maupun internasional   |
|      | 2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima bagi stakeholder Sekretariat Utama | 1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama | 1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi<br>2. Indeks Kepuasan Media   | 1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan serta  | 1. Peningkatan kualitas komunikasi, informasi, edukasi dan komunikasi publik kepada masyarakat dan pemangku  |

| MISI | TUJUAN  | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR   | ARAH KEBIJAKAN  | STRATEGI   |
|------|---|---|---|---|--|
|      |   |   | 3. Indeks Opini Publik BPOM<br>4. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen   | opini publik yang didukung dengan pelayanan publik yang prima.  | kepentingan yang lain  |
|      |   | 2. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama  | 1. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti<br>2. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama<br>3. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama |   |  |
|      |   | 1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal<br>2. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal | 1. Nilai RB Sekretariat Utama<br>2. Nilai AKIP Sekretariat Utama<br>Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama  |   |  |
|      | 3. Terwujudnya Unit Organisasi Sekretariat Utama yang handal, profesional dan inovatif. |   |   | 1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkup Sekretariat Utama yang didukung dengan SDM yang profesional serta pemanfaatan | 1. Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkup Sekretariat Utama termasuk peningkatan kualitas SDM serta |

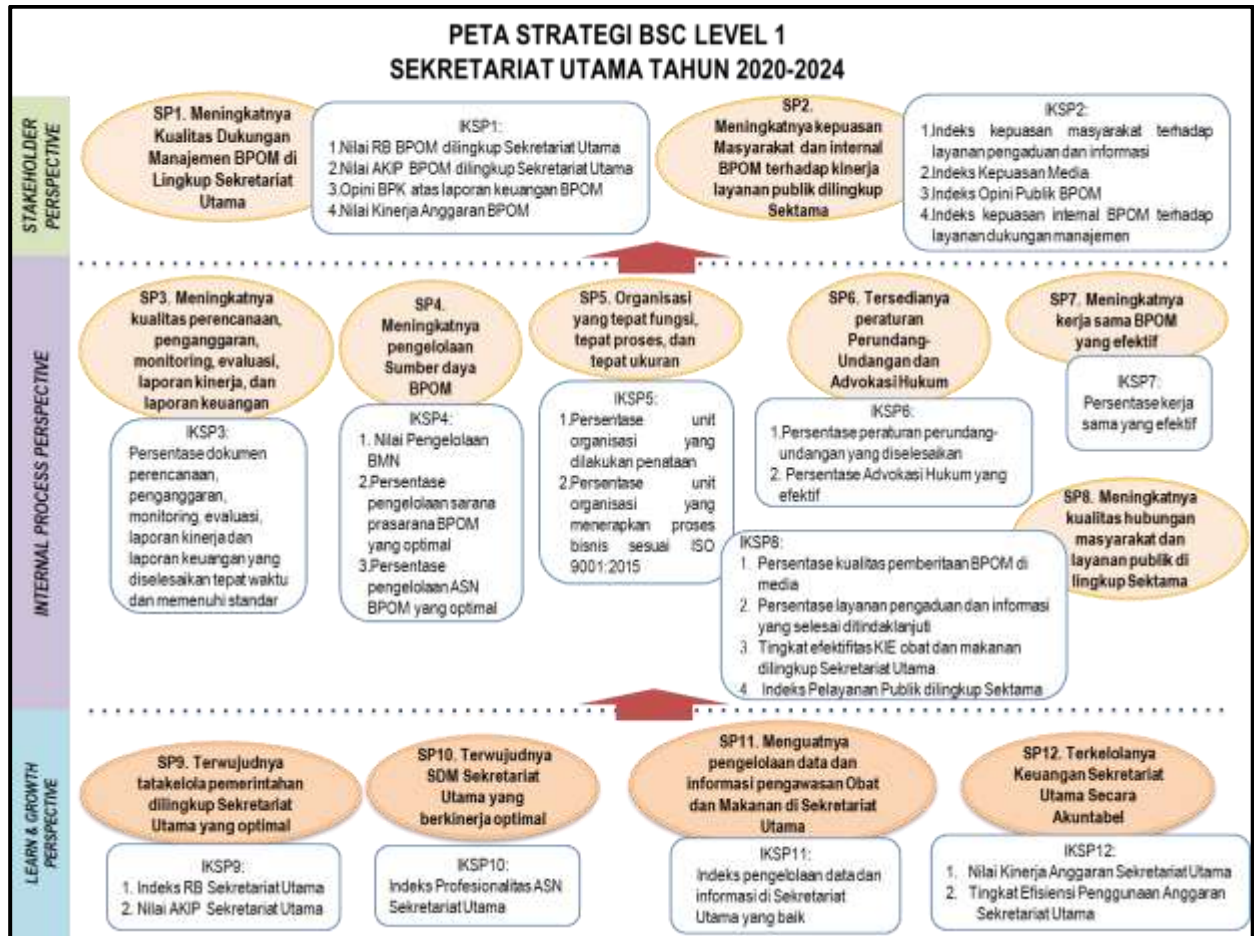
| MISI | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR   | ARAH KEBIJAKAN                    | STRATEGI   |
|------|--------|---|---|-----------------------------------|--|
|      |        | 3. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik  | teknologi informasi yang optimal. | pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan bisnis proses. |
|      |        | 4. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel                                   | 1. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama<br>2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama (2020-2021) |                                   |  |

3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Utama

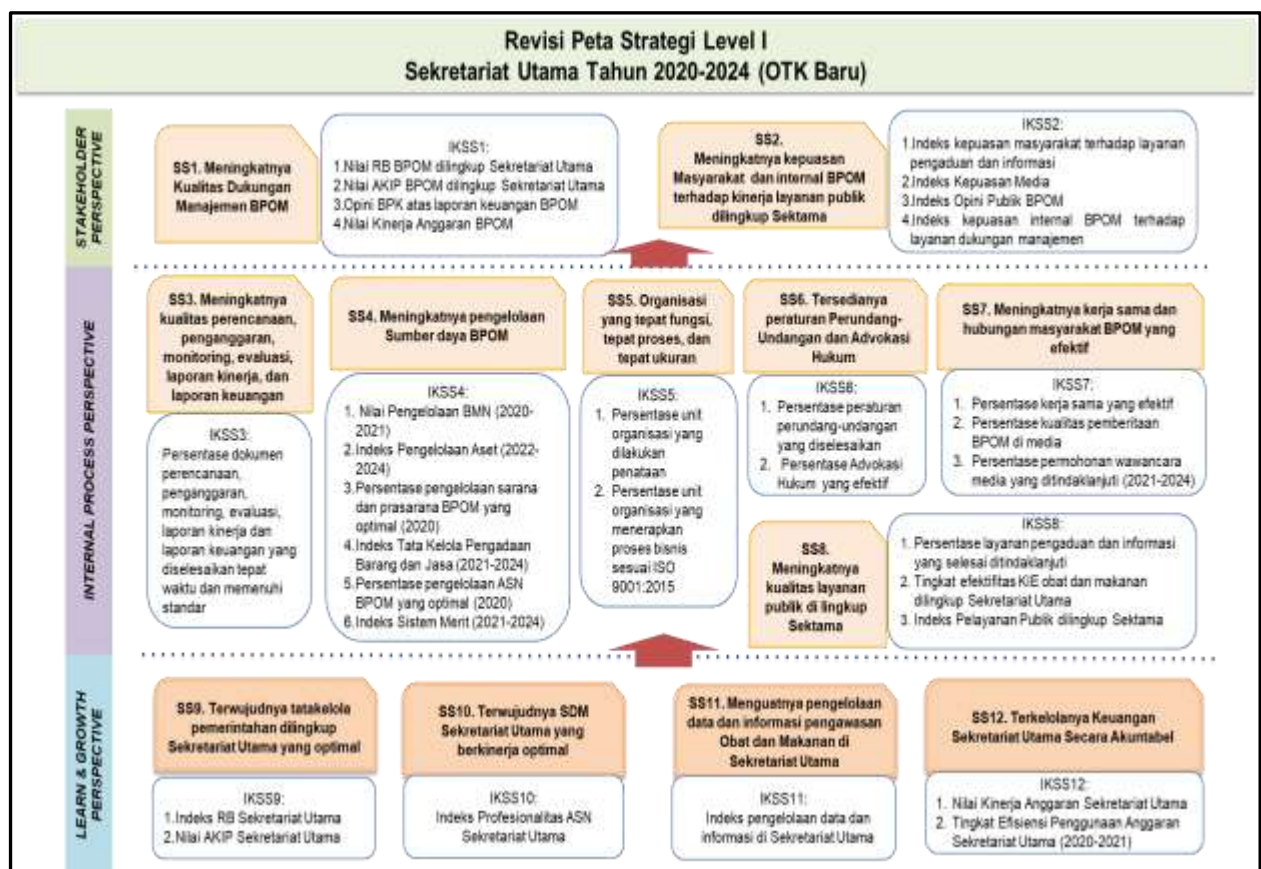
Sekretariat Utama telah melakukan reviu terhadap peta strategi Level 1 dan 2 di Lingkungan Sekretariat Utama BPOM yang memuat sasaran strategis dan IKU sebagai implikasi terhadap perubahan OTK BPOM khususnya di Lingkup Sekretariat Utama sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Utama secara optimal. Secara umum, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, namun dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

- a. Dilakukan pengelompokan sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Utama sehingga lebih memudahkan proses cascading sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama ke Unit Kerja dibawahnya.
- b. Adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem, antara lain indikator:
  - 1) “Nilai Pengelolaan BMN” menjadi “Indeks Pengelolaan Aset”.
  - 2) “Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”.
  - 3) “Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Sistem Merit”.
- c. Adanya penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.
- d. Adanya penghapusan indikator “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Utama” mulai Tahun 2022 karena secara prinsip sudah tercakup dalam indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama”.

Adapun penyesuaian/revisi sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama BPOM tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi Sekretariat Utama BPOM sebagai berikut:



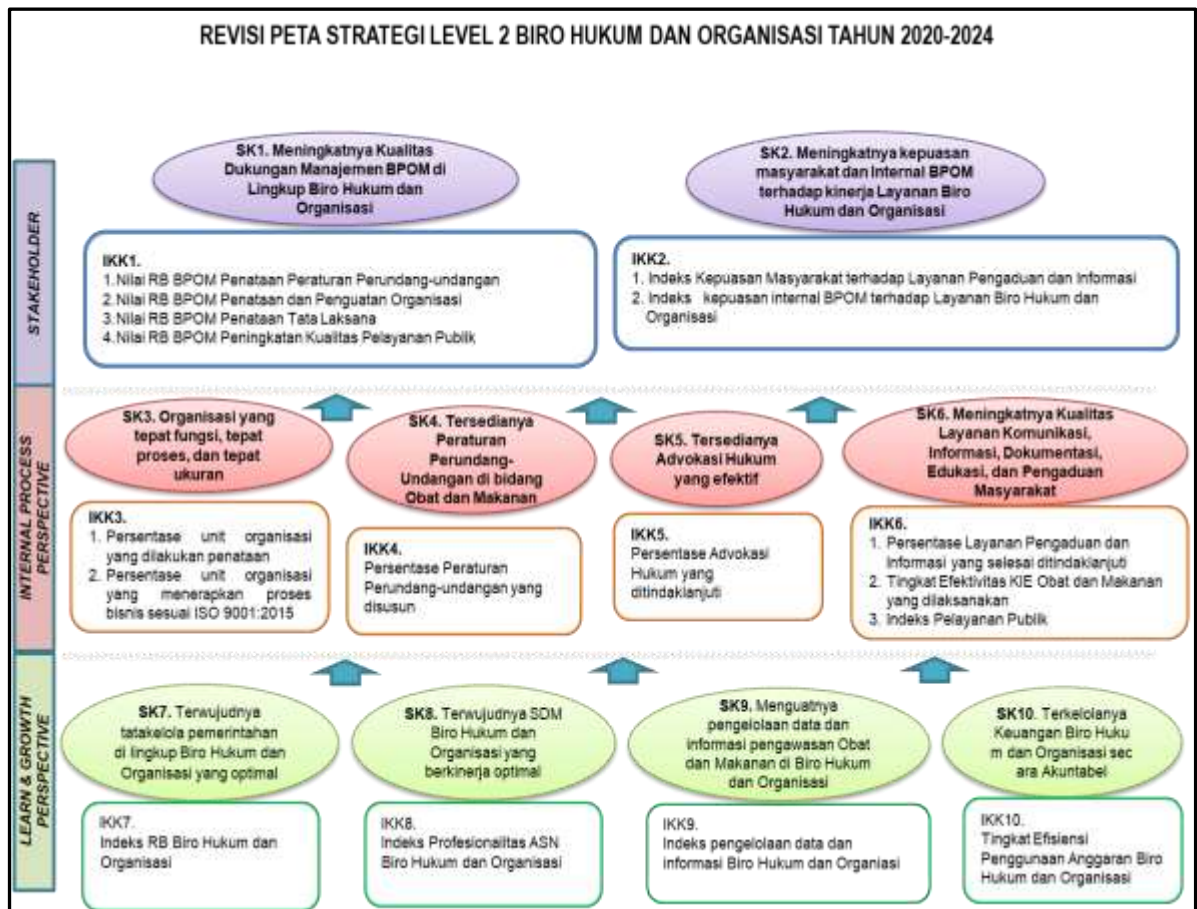
Gambar 7. Peta Strategi Level I Sekretariat Utama 2020-2024 (Semula)



Gambar 8. Peta Strategi Level I Sekretariat Utama 2020-2024 (Menjadi)

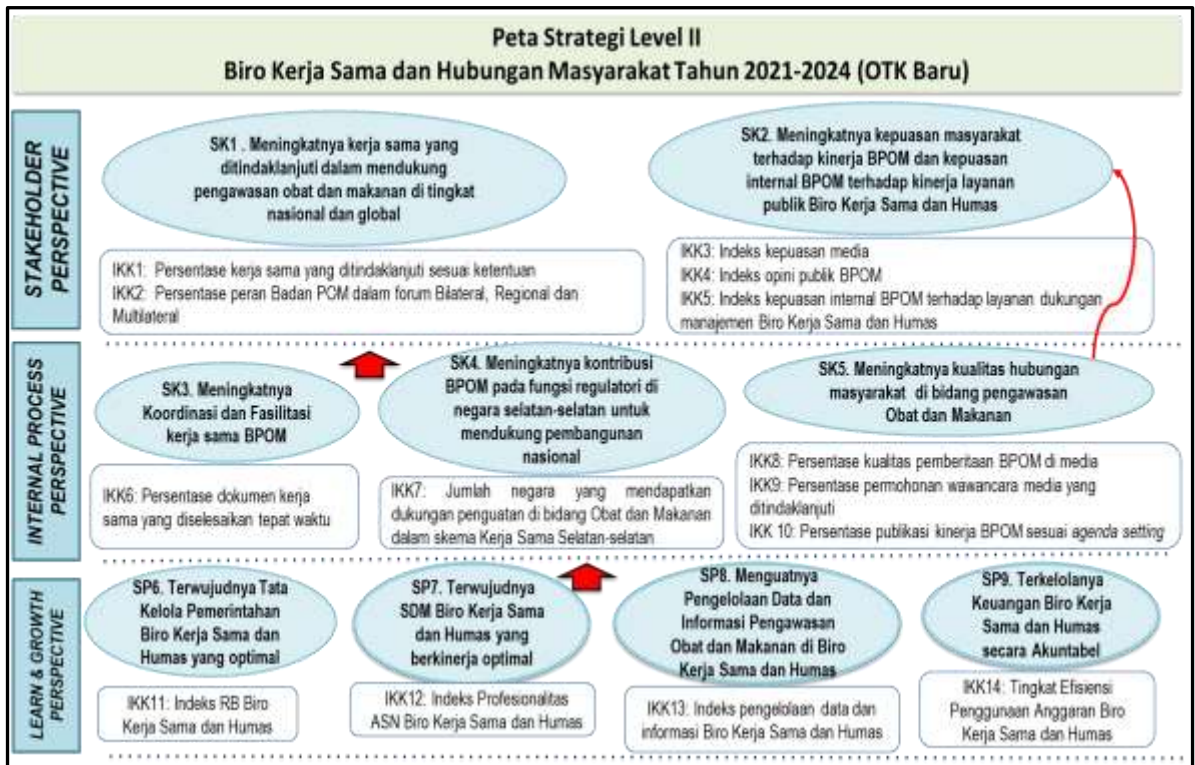
Revisi Peta strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 yang mencakup Sasaran Strategis, indikator dan target menjadi acuan dalam proses penjenjangan kinerja Unit Organisasi Eselon II dibawahnya. Untuk itu, juga dilakukan reuiu terhadap Peta Strategi Level II di Lingkup Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja BPOM terkini (Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM). Adapun revisi/penyesuaian kinerja Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan Sekretariat Utama sebagaimana digambarkan dalam Peta Strategi Level II di Lingkup Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

**a. Revisi Peta Strategi Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020-2024**



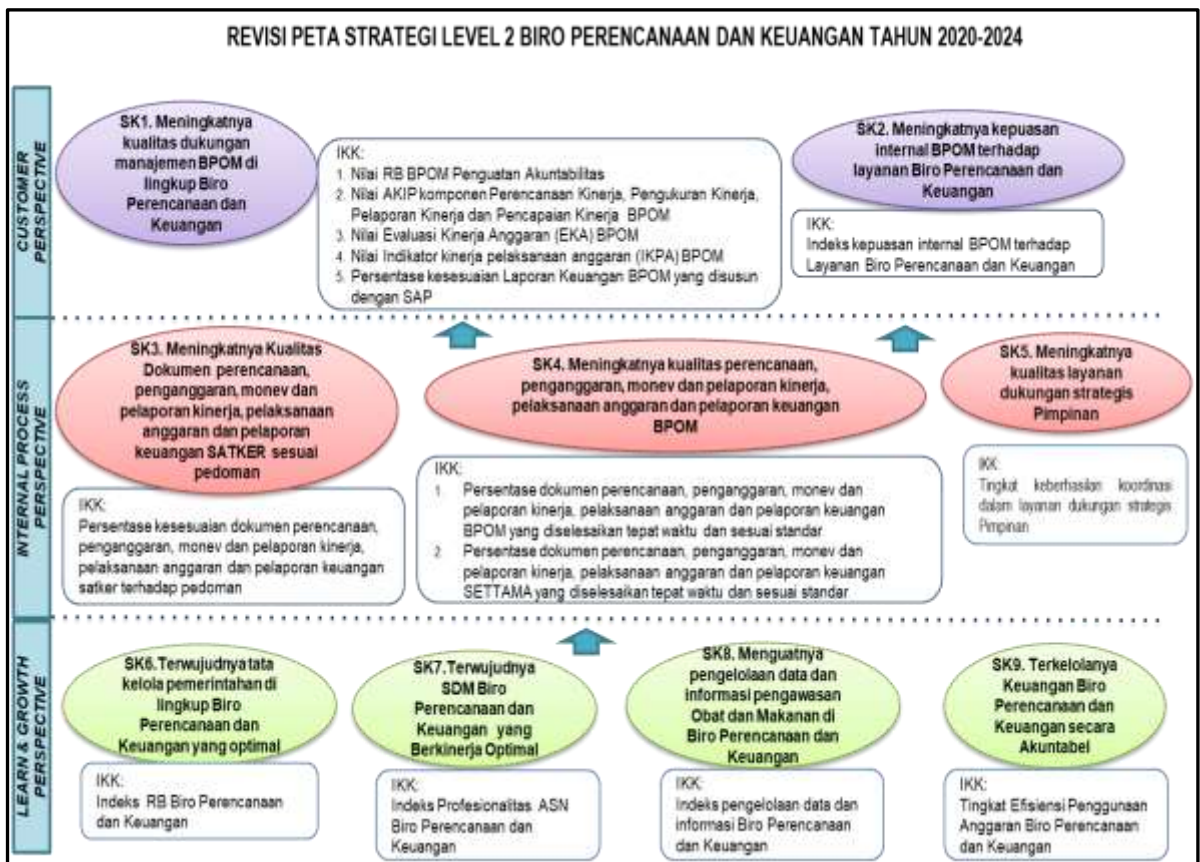
**Gambar 9. Revisi Peta Strategi Level II Biro Hukum dan Organisasi 2020-2024 (OTK baru)**

**b. Peta Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2021-2024**



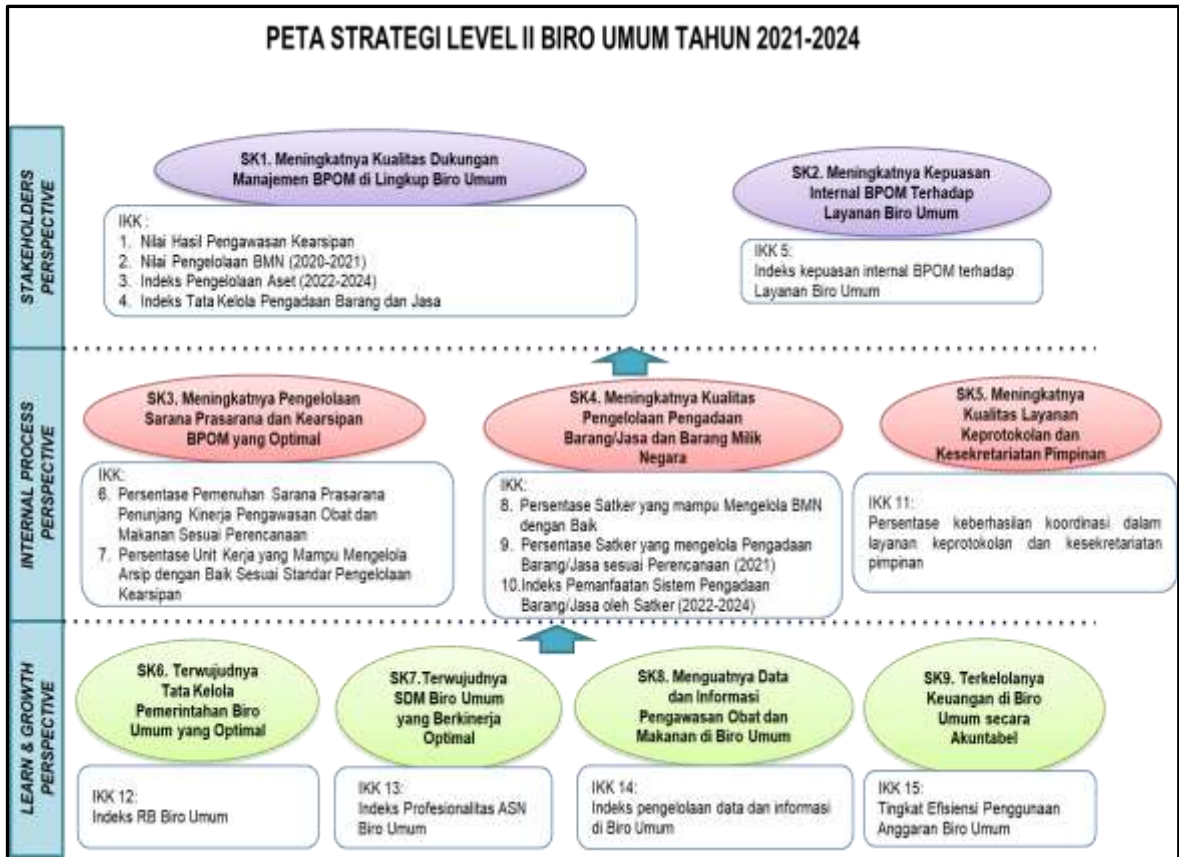
**Gambar 10. Revisi Peta Strategi Level II Biro Kerja Sama dan Humas Tahun 2021-2024 (OTK baru)**

**c. Revisi Peta Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024**



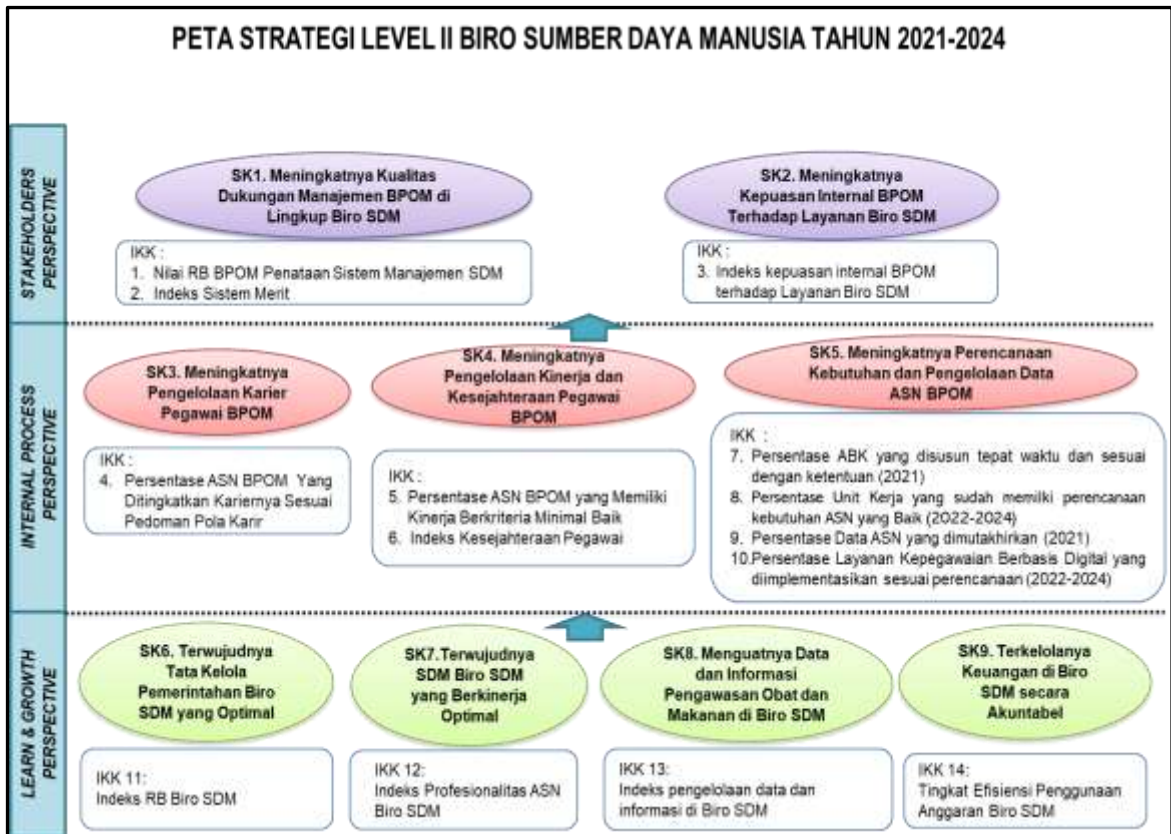
**Gambar 11. Revisi Peta Strategi Level II Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 (OTK baru)**

d. **Peta Strategi Biro Umum Tahun 2021-2024**



**Gambar 12. Peta Strategi Level II Biro Umum Tahun 2021-2024 (OTK baru)**

e. **Peta Strategi Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2024**



**Gambar 13. Peta Strategi Level II Biro Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2024 (OTK baru)**

## C. **Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

### 1. **Arah Kebijakan Sekretariat Utama**

Tidak ada perubahan terhadap Arah Kebijakan Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran dan tujuan Sekretariat Utama. Adapun Arah Kebijakan Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan serta opini publik yang didukung dengan pelayanan publik yang prima.
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM BPOM serta optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana BPOM.
- c. Peningkatan kualitas dan efektifitas regulasi dan advokasi hukum dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.
- d. Penguatan dukungan koordinasi dan kerjasama BPOM dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penguatan peran dan posisi BPOM di dunia internasional.
- e. Peningkatan akuntabilitas kinerja BPOM, kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- f. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkup Sekretariat Utama yang didukung dengan SDM yang profesional serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal.

### 2. **Strategi Sekretariat Utama**

Secara umum tidak terdapat perubahan Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, namun demikian dilakukan sedikit penyesuaian pada strategi Sekretariat Utama ke-2 yaitu dengan menambahkan penekanan pada Peningkatan kualitas pengelolaan SDM yang **berbasis sistem merit** sebagaimana sesuai dengan perubahan strategi BPOM.

**Tabel 5. Perubahan Strategi Sekretariat Utama 2020-2024**

| <b>Strategi (Semula)</b>  | <b>Strategi (Menjadi)</b>  |
|---|--|
| 1. Peningkatan kualitas komunikasi, informasi, edukasi dan komunikasi publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain.            | 1. Peningkatan kualitas komunikasi, informasi, edukasi dan komunikasi publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang lain.   |
| 2. Peningkatan kualitas pengelolaan SDM dan sumber daya lain termasuk sarana prasana penunjang kinerja secara akuntabel, efektif, dan efisien | 2. Peningkatan kualitas pengelolaan SDM <b>berbasis sistem merit</b> dan sumber daya lain termasuk sarana prasana penunjang kinerja secara akuntabel, efektif, dan efisien dalam |

| <b>Strategi (Semula)</b>   | <b>Strategi (Menjadi)</b>  |
|--|--|
| <p>dalam rangka kinerja pengawasan dan pelayanan publik yang prima.</p> <p>3. Peningkatan kualitas kebijakan/regulasi BPOM yang implementatif sesuai kebutuhan publik serta penguatan advokasi hukum dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.</p> <p>4. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan anggaran BPOM, serta organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat ukuran dan proses.</p> <p>5. Penguatan efektivitas kerjasama BPOM bersama lintas sektor baik nasional maupun internasional.</p> <p>6. Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkup Sekretariat Utama termasuk peningkatan kualitas SDM serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan bisnis proses.</p> | <p>rangka kinerja pengawasan dan pelayanan publik yang prima.</p> <p>3. Peningkatan kualitas kebijakan/regulasi BPOM yang implementatif sesuai kebutuhan publik serta penguatan advokasi hukum dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang optimal.</p> <p>4. Peningkatan kualitas manajemen kinerja dan anggaran BPOM, serta organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat ukuran dan proses.</p> <p>5. Penguatan efektivitas kerjasama BPOM bersama lintas sektor baik nasional maupun internasional.</p> <p>6. Peningkatan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkup Sekretariat Utama termasuk peningkatan kualitas SDM serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan bisnis proses.</p> |

### 3. Kerangka Regulasi

Terkait Kerangka Regulasi Sekretariat Utama, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Utama BPOM 2020-2024. Kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan regulasi Sekretariat Utama BPOM dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja Sekretariat Utama.

### 4. Kerangka Kelembagaan

Penyederhanaan Birokrasi sebagai bagian dari proses penataan birokrasi menuntut adanya penyesuaian kerangka kelembagaan agar sistem penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan menjadi lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan tugasnya untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi BPOM, Sekretariat Utama diharapkan dapat menjadi role model dalam perwujudan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran disetiap struktur organisasinya.

#### a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Utama mengacu pada sasaran strategi Sekretariat Utama (*structure follows strategy*) yang disempurnakan dengan mengacu pada rekomendasi evaluasi kelembagaan. Evaluasi kelembagaan dilakukan terhadap dimensi struktur dan dimensi proses organisasi dalam

menghadapi lingkungan strategis terkini sehingga struktur organisasi Sekretariat Utama akan terus menyesuaikan diri agar tercipta unit organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran disetiap struktur organisasi di lingkup Sekretariat Utama.

Dalam rangka menciptakan organisasi yang tepat proses, tepat fungsi dan tepat ukuran, dan dengan mengacu pada hasil evaluasi kelembagaan maka perlu dilakukan redistribusi tugas dan fungsi antar unit di lingkup Sekretariat Utama. Redistribusi tersebut adalah dengan memindahkan fungsi koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana yang awalnya berada pada unit Biro Hukum dan Organisasi kepada Biro Sumber Daya Manusia. Dengan demikian, penataan organisasi lingkup Sekretariat Utama hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No. | Semula                                  | Menjadi                                 | Keterangan/Justifikasi   |
|-----|---|---|--|
| 1   | Biro Perencanaan dan Keuangan           | Biro Perencanaan dan Keuangan           | Tetap  |
| 2   | Biro Umum                               | Biro Umum                               | Tetap  |
| 3   | Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | Tetap  |
| 4   | Biro Hukum dan Organisasi               | Biro Hukum                              | 1. Meredistribusi tingginya beban pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Hukum dan Organisasi kepada Biro Sumber Daya Manusia agar tercipta keselarasan antar Unit-Unit Eselon II<br>2. Mengintegrasikan tiga komponen utama dalam kelembagaan yaitu Organisasi, Tata Laksana dan SDM kedalam satu koordinasi Unit Eselon II |
| 5   | Biro Sumber Daya Manusia                | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi |  |

b. Tata Laksana

Untuk mewujudkan Sekretariat Utama sebagai organisasi yang *agile*, fleksibel, dan kolaboratif yang menjadi tujuan penyederhanaan birokrasi, maka langkah-langkah penataan tata laksana yang telah ditetapkan akan lebih berorientasi pada pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis dengan memaksimalkan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

c. Sumber Daya Manusia

Dengan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan berpengaruh pada pola pengelolaan SDM yang meliputi perencanaan kebutuhan SDM, pengelolaan karir, pengelolaan kinerja, pengelolaan

kesejahteraan hingga pengelolaan data dan informasi SDM. Dengan demikian pengelolaan SDM di lingkup Sekretariat Utama tidak akan terlepas dari pertimbangan pemanfaatan SPBE.

## **D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

### **1. Target Kinerja**

Berdasarkan pembahasan pada poin B.3. Sasaran Strategis dan IKU Sekretariat Utama, terdapat perubahan peta strategi level I Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 yang memuat sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama. Selanjutnya, telah dilakukan juga reviu terhadap target kinerja Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru tersebut dengan memperhatikan baseline berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020.

Dari 28 (dua puluh delapan) IKU Sekretariat Utama, secara umum target tetap dan meningkat. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- a. **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)**, di mana penurunan target disebabkan adanya penambahan Satker baru yaitu sebanyak 15 Loka Satker Mandiri yang belum memiliki data baseline sebagai dasar penetapan target.
- b. **Indeks RB dan Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama.** Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu, telah dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun baik pada Indeks RB maupun Nilai AKIP.
- c. **Indeks Opini Publik BPOM**, target 2021-2022 dibawah realisasi 2020 karena terdapat penambahan jumlah responden di tahun 2021 sebesar 6,67% dari tahun 2020.
- d. **Persentase Kerja Sama yang Efektif**, target dibawah realisasi 2020 karena terdapat perubahan Definisi Operasional (DO) dari komponen pembentuk indikator. Pada Tahun 2020, indikator pembentuk dari unit kerja terdiri dari rata-rata Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti dan jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST). KSS merupakan prioritas nasional dengan target jumlah negara KSS pada Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) negara. Sehingga dengan capaian 100%, maka mengungkit capaian presentase Kerja sama yang efektif. Pada Tahun 2021, Persentase Kerja

Sama yang Efektif terbentuk dari 2 (dua) komponen yaitu (a) presentase kerja sama yang ditindaklanjuti dan (b) presentase peran/partisipasi Badan POM dalam forum kerja sama internasional. Berdasarkan definisi operasional ini, capaian realisasi 2020 sebesar 83,33%

Secara rinci, perubahan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja Sekretariat Utama BPOM Tahun 2021-2024**

| SEMULA                      |   |        |       |       |       |       | MENJADI                     |   |                |        |       |       |       |
|-----------------------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|----------------|--------|-------|-------|-------|
| Sasaran Strategis/Indikator |   | Target |       |       |       |       | Sasaran Strategis/Indikator |   | Realisasi 2020 | Target |       |       |       |
|                             |   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                             |   |                | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |
| <b>SP 1</b>                 | <b>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama</b>                           |        |       |       |       |       | <b>SP 1</b>                 | <b>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM</b>  |                |        |       |       |       |
| 1.1                         | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama   | 41     | 43,25 | 46,39 | 47,21 | 47,86 | 1.1                         | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama   | 40,35          | 32,03  | 33,21 | 34,4  | 35,58 |
| 1.2                         | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama   | 73,25  | 76,73 | 81,08 | 81,93 | 82,8  | 1.2                         | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama   | 70,67          | 72,44  | 73,33 | 74,22 | 75,14 |
| 1.3                         | Opini BPK atas laporan keuangan BPOM  | WTP    | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | 1.3                         | Opini BPK atas laporan keuangan BPOM  | WTP            | WTP    | WTP   | WTP   | WTP   |
| 1.4                         | Nilai Kinerja Anggaran BPOM   | 93     | 94    | 95    | 96    | 97    | 1.4                         | Nilai Kinerja Anggaran BPOM   | 95,37          | 93     | 93,5  | 94,5  | 95,6  |
| <b>SP 2</b>                 | <b>Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama</b> |        |       |       |       |       | <b>SP 2</b>                 | <b>Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama</b> |                |        |       |       |       |
| 2.1                         | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan   | 79,5   | 83    | 86    | 89    | 92    | 2.1                         | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan   | 85,3           | 87     | 88    | 89    | 90    |

| SEMULA                      |   |        |      |      |      |      | MENJADI                     |   |                |        |      |      |      |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|------|-----------------------------|---|----------------|--------|------|------|------|
| Sasaran Strategis/Indikator |   | Target |      |      |      |      | Sasaran Strategis/Indikator |   | Realisasi 2020 | Target |      |      |      |
|                             |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                             |   |                | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 |
|                             | pengaduan dan informasi   |        |      |      |      |      |                             | pengaduan dan informasi   |                |        |      |      |      |
| 2.2                         | Indeks Kepuasan Media   | 73     | 73,5 | 74   | 74,5 | 75   | 2.2                         | Indeks Kepuasan Media   | 74,02          | 74     | 74,5 | 75   | 75,5 |
| 2.3                         | Indeks Opini Publik BPOM  | 66     | 67   | 68   | 69   | 70   | 2.3                         | Indeks Opini Publik BPOM  | 79,6           | 78     | 79   | 80   | 81   |
| 2.4                         | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen   | 3,70   | 3,73 | 3,75 | 3,78 | 3,81 | 2.4                         | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen   | 3,8            | 3,70   | 3,72 | 3,75 | 3,78 |
| <b>SP 3</b>                 | <b>Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan</b>   |        |      |      |      |      | <b>SP 3</b>                 | <b>Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan</b>   |                |        |      |      |      |
| 3.1                         | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 3.1                         | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100            | 100    | 100  | 100  | 100  |

| SEMULA                      |   |        |      |      |      |      | MENJADI                     |   |                |               |              |              |               |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|------|-----------------------------|---|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Sasaran Strategis/Indikator |   | Target |      |      |      |      | Sasaran Strategis/Indikator |   | Realisasi 2020 | Target        |              |              |               |
|                             |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                             |   |                | 2021          | 2022         | 2023         | 2024          |
| <b>SP 4</b>                 | <b>Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM</b>                    |        |      |      |      |      | <b>SP 4</b>                 | <b>Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM</b>                    |                |               |              |              |               |
| 4.1                         | Nilai Pengelolaan BMN   | 80     | 82   | 84   | 86   | 88   | 4.1                         | Nilai Pengelolaan BMN   | 79             | 80            | -            | -            | -             |
|                             |   |        |      |      |      |      | 4.2                         | Indeks Pengelolaan Aset   |                | -             | 2,93         | 2,95         | 2,98          |
| 4.2                         | Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal           | 78     | 80   | 82   | 84   | 86   |                             |   |                |               |              |              |               |
| 4.3                         | Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal                        | 81     | 83   | 84   | 85   | 87   |                             |   |                |               |              |              |               |
|                             |   |        |      |      |      |      | 4.3                         | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa                        |                | 56            | 72           | 74           | 80            |
|                             |   |        |      |      |      |      | 4.4                         | Indeks Sistem Merit   | Lev. 4 (0,88)  | Lev. 4 (0,88) | Lev 4 (0,89) | Lev 4 (0,89) | Lev. 4 (0,90) |
| <b>SP 5</b>                 | <b>Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran</b> |        |      |      |      |      | <b>SP 5</b>                 | <b>Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran</b> |                |               |              |              |               |
| 5.1                         | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan                  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 5.1                         | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan                  | 100            | 100           | 100          | 100          | 100           |

| SEMULA                      |   |        |      |      |      |      | MENJADI                     |   |                |        |       |       |       |
|-----------------------------|---|--------|------|------|------|------|-----------------------------|---|----------------|--------|-------|-------|-------|
| Sasaran Strategis/Indikator |   | Target |      |      |      |      | Sasaran Strategis/Indikator |   | Realisasi 2020 | Target |       |       |       |
|                             |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                             |   |                | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |
| 5.2                         | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | 79     | 100  | 100  | 100  | 100  | 5.2                         | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | 79             | 100    | 100   | 100   | 100   |
| <b>SP 6</b>                 | <b>Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum</b>            |        |      |      |      |      | <b>SP 6</b>                 | <b>Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum</b>            |                |        |       |       |       |
| 6.1                         | Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan                     | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 6.1                         | Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan                     | 100            | 100    | 100   | 100   | 100   |
| 6.2                         | Persentase Advokasi Hukum yang efektif  | 82     | 83   | 84   | 85   | 86   | 6.2                         | Persentase Advokasi Hukum yang efektif  | 96,43          | 95,5   | 95,75 | 96    | 96,5  |
| <b>SP 7</b>                 | <b>Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif</b>                              |        |      |      |      |      | <b>SP 7</b>                 | <b>Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif</b>      |                |        |       |       |       |
| 7.1                         | Persentase kerja sama yang efektif  | 82     | 84   | 86   | 88   | 90   | 7.1                         | Persentase kerja sama yang efektif  | 91,67          | 84     | 86    | 88    | 90    |
|                             |   |        |      |      |      |      | 7.2                         | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media                                 | 99,84          | 99,82  | 99,84 | 99,85 | 99,86 |
|                             |   |        |      |      |      |      | 7.3                         | Persentase permohonan   | 53,17          | 65     | 66    | 67    | 68    |

| SEMULA                      |  |        |      |       |       |       | MENJADI                     |   |                |        |       |       |       |
|-----------------------------|--|--------|------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|----------------|--------|-------|-------|-------|
| Sasaran Strategis/Indikator |  | Target |      |       |       |       | Sasaran Strategis/Indikator |   | Realisasi 2020 | Target |       |       |       |
|                             |  | 2020   | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                             |   |                | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |
|                             |  |        |      |       |       |       |                             | wawancara media yang ditindaklanjuti  |                |        |       |       |       |
| <b>SP 8</b>                 | <b>Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama</b> |        |      |       |       |       | <b>SP 8</b>                 | <b>Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama</b>                      |                |        |       |       |       |
| 8.1                         | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media  | 99,59  | 99,6 | 99,61 | 99,62 | 99,63 |                             |   |                |        |       |       |       |
| 8.2                         | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti                | 99     | 99,2 | 99,4  | 99,6  | 99,8  | 8.1                         | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti             | 99,47          | 99,2   | 99,4  | 99,6  | 99,8  |
| 8.3                         | Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama                   | 73     | 75   | 78    | 80    | 83    | 8.2                         | Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama                | 91             | 92,52  | 94,37 | 96,26 | 98,19 |
| 8.4                         | Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama  | 3,91   | 4,06 | 4,21  | 4,36  | 4,51  | 8.3                         | Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama   | 4,48           | 4,51   | 4,55  | 4,60  | 4,65  |
| <b>SP 9</b>                 | <b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal</b>    |        |      |       |       |       | <b>SP 9</b>                 | <b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal</b> |                |        |       |       |       |

| SEMULA                      |   |                |                |                |                |                | MENJADI                     |   |                |                |      |      |      |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---|----------------|----------------|------|------|------|
| Sasaran Strategis/Indikator |   | Target         |                |                |                |                | Sasaran Strategis/Indikator |   | Realisasi 2020 | Target         |      |      |      |
|                             |   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |                             |   |                | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9.1                         | Indeks RB Sekretariat Utama   | 85             | 89             | 93             | 94             | 95             | 9.1                         | Indeks RB Sekretariat Utama   | 73,75          | 79,5           | 81,5 | 83,5 | 85,5 |
| 9.2                         | Nilai AKIP Sekretariat Utama  | 81             | 85             | 90             | 91             | 92             | 9.2                         | Nilai AKIP Sekretariat Utama  | 80,69          | 83             | 85,3 | 87,6 | 89,9 |
| <b>SP 10</b>                | <b>Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal</b>                                  |                |                |                |                |                | <b>SP 10</b>                | <b>Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal</b>                                  |                |                |      |      |      |
| 10.1                        | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama  | 78             | 79             | 80             | 81             | 82             | 10.1                        | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama  | 77,37          | 79,6           | 80,6 | 81,6 | 82,6 |
| <b>SP 11</b>                | <b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama</b> |                |                |                |                |                | <b>SP 11</b>                | <b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama</b> |                |                |      |      |      |
| 11.1                        | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik                              | 1,51           | 2              | 2,26           | 2,5            | 3              | 11.1                        | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama  | 0,2            | 2              | 2,25 | 2,5  | 3    |
| <b>SP 12</b>                | <b>Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel</b>                                   |                |                |                |                |                | <b>SP 12</b>                | <b>Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel</b>                                   |                |                |      |      |      |
| 12.1                        | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama  | 93             | 94             | 95             | 96             | 97             | 12.1                        | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama  | 91,47          | 93             | 93,6 | 94,2 | 94,8 |
| 12.2                        | Tingkat Efisiensi Penggunaan  | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | 12.2                        | Tingkat Efisiensi Penggunaan  | 75             | Efisien (100%) | -    | -    | -    |

| SEMULA                      |                            |        |      |      |      | MENJADI |                             |                            |                |        |      |      |      |
|-----------------------------|----------------------------|--------|------|------|------|---------|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------|------|------|------|
| Sasaran Strategis/Indikator |                            | Target |      |      |      |         | Sasaran Strategis/Indikator |                            | Realisasi 2020 | Target |      |      |      |
|                             |                            | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    |                             |                            |                | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 |
|                             | Anggaran Sekretariat Utama |        |      |      |      |         |                             | Anggaran Sekretariat Utama |                |        |      |      |      |

## 2. Program dan Kegiatan Sekretariat Utama

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Sekretariat Utama melaksanakan Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di dalam program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM khususnya di lingkup Sekretariat Utama sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1-4, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan BPOM yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BPOM. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Kegiatan BPOM di Sekretariat Utama Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Utama BPOM**

| No. | Kegiatan OTK Lama (Semula)  | Kegiatan OTK Baru (Menjadi)  |
|-----|---|--|
| 1   | Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan    | -  |
| 2   | Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM                      | Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM |
| 3   | Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM | Pengelolaan Sumber Daya Manusia                                    |
|     |   | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM                              |

## 3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Sekretariat Utama secara umum masih mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama secara memadai khususnya dalam pemenuhan target kinerja hingga akhir tahun 2024, namun demikian mengingat adanya penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja di Lingkup Sekretariat Utama yang berdampak terhadap perubahan kegiatan, perlu dilakukan reviu terhadap kerangka pendanaan pada Kegiatan di Lingkup Sekretariat Utama dengan memperhatikan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya (menggunakan baseline anggaran DIPA awal Tahun 2021 dan 2022), sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Adapapun reviu kerangka pendanaan Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 8. Penyesuaian Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Utama  
Tahun 2021-2024**

| Program/Kegiatan   | Alokasi (Rp Juta) |                |                |                |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>  | <b>386.965</b>    | <b>398.971</b> | <b>438.868</b> | <b>482.755</b> |
| Kegiatan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana                           | 14.316            | 14.408         | 15.849         | 17.434         |
| Kegiatan Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM  | 14.318            | 15.608         | 17.169         | 18.886         |
| Kegiatan Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan | 22.298            | 22.298         | 24.528         | 26.981         |
| Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia   | 9.692             | 9.770          | 10.747         | 11.822         |
| Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM   | 320.150           | 336.886        | 370.575        | 407.632        |

**E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan**

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020 serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM khususnya di Lingkup Sekretariat Utama dimana terdapat Unit Kerja yang dihapus dan di lebur fungsinya ke Unit Kerja lain, pergeseran tugas dan fungsi antar Unit Kerja serta munculnya Unit Kerja baru untuk peningkatan kinerja Sekretaria Utama. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuain dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024 mengacu Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagai berikut:

**TABEL 9. MATRIKS PERUBAHAN KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM  
PADA LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2020-2024**

| SEMULA                         |   |        |       |       |       | MENJADI                        |             |  |        |       |       | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |                   |
|--------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------------|--|--------|-------|-------|-----------|------------|--|-------------------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |   | Target |       |       |       | Sasaran<br>Strategis/Indikator |             | Realis<br>asi<br>2020                                | Target |       |       |           |            |  |                   |
|                                |   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  |                                |             |  | 2024   | 2021  | 2022  |           |            |  | 2023              |
| Program Dukungan Manajemen     |   |        |       |       |       | Program Dukungan Manajemen     |             |  |        |       |       |           |            |  |                   |
| <b>SP 1</b>                    | <b>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama</b> |        |       |       |       |                                | <b>SP 1</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM</b> |        |       |       |           |            |  |                   |
| 1.1                            | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama   | 41     | 43.25 | 46.39 | 47.21 | 47.86                          | 1.1         | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama            | 40,35  | 32,03 | 33,21 | 34,4      | 35,58      | Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun | Sekretariat Utama |
| 1.2                            | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama                                       | 73.25  | 76.73 | 81.08 | 81.93 | 82.8                           | 1.2         | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama          | 70,67  | 72,44 | 73,33 | 74,22     | 75,14      | Dilakukan penyesuaian kembali target   | Sekretariat Utama |

| SEMULA                         |   |        |      |      |      |      | MENJADI                        |   |                       |        |      |      |      | Pro<br>PN | Keterangan  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |
|--------------------------------|---|--------|------|------|------|------|--------------------------------|---|-----------------------|--------|------|------|------|-----------|---|---------------------------------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |   | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator |   | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |      |           |   |                                 |
|                                |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                |   |                       | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 |           |   |                                 |
|                                |   |        |      |      |      |      |                                |   |                       |        |      |      |      |           | terhadap trend kenaikan per tahun   |                                 |
| 1.3                            | Opini BPK atas laporan keuangan BPOM  | WTP    | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | 1.3                            | Opini BPK atas laporan keuangan BPOM  | WTP                   | WTP    | WTP  | WTP  | WTP  |           |   | Sekretariat Utama               |
| 1.4                            | Nilai Kinerja Anggaran BPOM   | 93     | 94   | 95   | 96   | 97   | 1.4                            | Nilai Kinerja Anggaran BPOM   | 95,37                 | 93     | 93,5 | 94,5 | 95,6 |           | Penurunan target disebabkan adanya penambahan Satker baru yaitu sebanyak 15 Loka Satker Mandiri yang belum memiliki data baseline sebagai dasar penetapan target. | Sekretariat Utama               |
| <b>SP 2</b>                    | <b>Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama</b> |        |      |      |      |      | <b>SP 2</b>                    | <b>Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama</b> |                       |        |      |      |      |           |   |                                 |
| 2.1                            | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi   | 79.5   | 83   | 86   | 89   | 92   | 2.1                            | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi   | 85,3                  | 87     | 88   | 89   | 90   |           |   | Sekretariat Utama               |
| 2.2                            | Indeks Kepuasan Media   | 73     | 73.5 | 74   | 74.5 | 75   | 2.2                            | Indeks Kepuasan Media   | 74,02                 | 74     | 74,5 | 75   | 75,5 |           |   | Sekretariat Utama               |
| 2.3                            | Indeks Opini Publik BPOM  | 66     | 67   | 68   | 69   | 70   | 2.3                            | Indeks Opini Publik BPOM  | 79,6                  | 78     | 79   | 80   | 81   |           | Target 2021-2022 dibawah realisasi 2020 karena terdapat penambahan  | Sekretariat Utama               |

| SEMULA                         |   |        |      |      |      |      | MENJADI                        |   |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan   | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |      |
|--------------------------------|---|--------|------|------|------|------|--------------------------------|---|-----------------------|--------|------|------|-----------|--|---------------------------------|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |   | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator |   | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |  |                                 |      |
|                                |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                |   |                       | 2021   | 2022 | 2023 |           |  |                                 | 2024 |
|                                |   |        |      |      |      |      |                                |   |                       |        |      |      |           | jumlah responden di tahun 2021 sebesar 6,67% dari tahun 2020   |                                 |      |
| 2.4                            | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen   | 3.70   | 3.73 | 3.75 | 3.78 | 3.81 | 2.4                            | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen   | 3,8                   | 3,70   | 3,72 | 3,75 | 3,78      | Terdapat penurunan target di 2021 karena terdapat 2 unit kerja baru dengan layanan yang diperluas dan lebih spesifik sehingga kemungkinan dapat menurunkan indeks kepuasan | Sekretariat Utama               |      |
| <b>SP 3</b>                    | <b>Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan</b>   |        |      |      |      |      | <b>SP 3</b>                    | <b>Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan</b>   |                       |        |      |      |           |  |                                 |      |
| 3.1                            | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 3.1                            | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100                   | 100    | 100  | 100  | 100       |  | Sekretariat Utama               |      |

| SEMULA                         |   |        |      |      |      |      | MENJADI                        |  |                       |        |      |      |      | Pro<br>PN | Keterangan  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |                   |
|--------------------------------|---|--------|------|------|------|------|--------------------------------|--|-----------------------|--------|------|------|------|-----------|---|---------------------------------|-------------------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |   | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |      |           |   |                                 |                   |
|                                |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                |  |                       | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 |           |   |                                 |                   |
| <b>SP 4</b>                    | <b>Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM</b>          |        |      |      |      |      | <b>SP 4</b>                    | <b>Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM</b> |                       |        |      |      |      |           |   |                                 |                   |
| 4.1                            | Nilai Pengelolaan BMN                                     | 80     | 82   | 84   | 86   | 88   | 4.1                            | Nilai Pengelolaan BMN                            | 79                    | 80     | -    | -    | -    |           |   | Sekretariat Utama               |                   |
|                                |   |        |      |      |      |      | 4.2                            | Indeks Pengelolaan Aset                          |                       | -      | 2,93 | 2,95 | 2,98 |           | Berdasarkan surat dari DJKN terdapat perubahan indikator pengelolaan BMN menjadi indeks pengelolaan asset sehingga merubah tools penilaian Satker |                                 |                   |
| 4.2                            | Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal | 78     | 80   | 82   | 84   | 86   |                                |  |                       |        |      |      |      |           |   | Sekretariat Utama               |                   |
| 4.3                            | Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal              | 81     | 83   | 84   | 85   | 87   |                                |  |                       |        |      |      |      |           |   | Sekretariat Utama               |                   |
|                                |   |        |      |      |      |      | 4.2                            | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa     | -                     | 56     | 72   | 74   | 80   |           | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dapat mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi 58 Satker di lingkungan BPOM |                                 | Sekretariat Utama |

| SEMULA                         |  |        |      |      |      |      | MENJADI                        |   |                       |                  |                  |                  | Pro<br>PN        | Keterangan  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |      |
|--------------------------------|--|--------|------|------|------|------|--------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator |   | Realis<br>asi<br>2020 | Target           |                  |                  |                  |   |                                 |      |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                |   |                       | 2021             | 2022             | 2023             |                  |   |                                 | 2024 |
|                                |  |        |      |      |      |      |                                |   |                       |                  |                  |                  |                  | memperhitungkan<br>5 aspek penilaian  |                                 |      |
|                                |  |        |      |      |      |      | 4.3                            | Indeks Sistem Merit   | Lev. 4<br>(0,88)      | Lev. 4<br>(0,88) | Lev. 4<br>(0,89) | Lev. 4<br>(0,89) | Lev. 4<br>(0,90) | Tahun yang tidak<br>dilakukan<br>penilaian<br>menggunakan<br>target sesuai<br>baseline terakhir | Sekretariat<br>Utama            |      |
| <b>SP 5</b>                    | <b>Organisasi yang<br/>tepat fungsi,<br/>tepat proses, dan<br/>tepat ukuran</b>              |        |      |      |      |      | <b>SP 5</b>                    | <b>Organisasi yang<br/>tepat fungsi, tepat<br/>proses, dan tepat<br/>ukuran</b>           |                       |                  |                  |                  |                  |   |                                 |      |
| 5.1                            | Persentase unit<br>organisasi yang<br>dilakukan<br>penataan                                  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 5.1                            | Persentase unit<br>organisasi yang<br>dilakukan penataan                                  | 100                   | 100              | 100              | 100              | 100              |   | Sekretariat<br>Utama            |      |
| 5.2                            | Persentase unit<br>organisasi yang<br>menerapkan<br>proses bisnis<br>sesuai ISO<br>9001:2015 | 79     | 100  | 100  | 100  | 100  | 5.2                            | Persentase unit<br>organisasi yang<br>menerapkan proses<br>bisnis sesuai ISO<br>9001:2015 | 79                    | 100              | 100              | 100              | 100              |   | Sekretariat<br>Utama            |      |
| <b>SP 6</b>                    | <b>Tersedianya<br/>peraturan<br/>Perundang-<br/>Undangan dan<br/>Advokasi Hukum</b>          |        |      |      |      |      | <b>SP 6</b>                    | <b>Tersedianya<br/>peraturan<br/>Perundang-<br/>Undangan dan<br/>Advokasi Hukum</b>       |                       |                  |                  |                  |                  |   |                                 |      |
| 6.1                            | Persentase<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan yang<br>diselesaikan                       | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 6.1                            | Persentase<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan yang<br>diselesaikan                    | 100                   | 100              | 100              | 100              | 100              |   | Sekretariat<br>Utama            |      |
| 6.2                            | Persentase<br>Advokasi Hukum<br>yang efektif   | 82     | 83   | 84   | 85   | 86   | 6.2                            | Persentase Advokasi<br>Hukum yang efektif   | 96,43                 | 95,5             | 95,75            | 96               | 96,5             |   | Sekretariat<br>Utama            |      |
| <b>SP 7</b>                    | <b>Meningkatnya<br/>kerja sama BPOM<br/>yang efektif</b>                                     |        |      |      |      |      | <b>SP 7</b>                    | <b>Meningkatnya<br/>kerja sama dan<br/>hubungan</b>                                       |                       |                  |                  |                  |                  |   |                                 |      |

| SEMULA                         |  |        |      |       |       |       | MENJADI                        |   |                       |        |       |       | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |                   |
|--------------------------------|--|--------|------|-------|-------|-------|--------------------------------|---|-----------------------|--------|-------|-------|-----------|------------|--|-------------------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |       |       |       | Sasaran<br>Strategis/Indikator |   | Realis<br>asi<br>2020 | Target |       |       |           |            |  |                   |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                                |   |                       | 2021   | 2022  | 2023  |           |            |  | 2024              |
|                                |  |        |      |       |       |       |                                | <b>masyarakat BPOM yang efektif</b>                                     |                       |        |       |       |           |            |  |                   |
| 7.1                            | Persentase kerja sama yang efektif   | 82     | 84   | 86    | 88    | 90    | 7.1                            | Persentase kerja sama yang efektif                                      | 91.67                 | 84     | 86    | 88    | 90        |            | Target dibawah realisasi 2020 karena terdapat perubahan DO dan telah dilakukan perhitungan realisasi 2020 berdasarkan DO baru tersebut dengan hasil sebesar 83,33% | Sekretariat Utama |
|                                |  |        |      |       |       |       | 7.2                            | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media                           | 99,84                 | 99,82  | 99,84 | 99,85 | 99,86     |            |  | Sekretariat Utama |
|                                |  |        |      |       |       |       | 7.3                            | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti              | 53,17                 | 65     | 66    | 67    | 68        |            |  | Sekretariat Utama |
| <b>SP 8</b>                    | <b>Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama</b> |        |      |       |       |       | <b>SP 8</b>                    | <b>Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama</b>          |                       |        |       |       |           |            |  |                   |
| 8.1                            | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media  | 99.59  | 99.6 | 99.61 | 99.62 | 99.63 |                                |   |                       |        |       |       |           |            |  |                   |
| 8.2                            | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti                | 99     | 99.2 | 99.4  | 99.6  | 99.8  | 8.1                            | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti | 99,47                 | 99,2   | 99,4  | 99,6  | 99,8      |            | Target 2021-2022 dibawah realisasi 2020 sehingga target 2021-2024 tetap karena terdapat penambahan   | Sekretariat Utama |



| SEMULA                         |  |                |                |                |                |                | MENJADI                        |  |                       |                |      |      | Pro<br>PN | Keterangan   | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |      |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--|-----------------------|----------------|------|------|-----------|--|---------------------------------|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target         |                |                |                |                | Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target         |      |      |           |  |                                 |      |
|                                |  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |                                |  |                       | 2021           | 2022 | 2023 |           |  |                                 | 2024 |
|                                | <b>pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama</b>  |                |                |                |                |                |                                | <b>pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama</b>  |                       |                |      |      |           |  |                                 |      |
| 11.1                           | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik   | 1.51           | 2              | 2.26           | 2.5            | 3              | 11.1                           | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama   | 0,2                   | 2              | 2,25 | 2,5  | 3         |  | Sekretariat Utama               |      |
| <b>SP 12</b>                   | <b>Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel</b>  |                |                |                |                |                | <b>SP 12</b>                   | <b>Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel</b>  |                       |                |      |      |           |  |                                 |      |
| 12.1                           | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama   | 93             | 94             | 95             | 96             | 97             | 12.1                           | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama   | 91,47                 | 93             | 93,6 | 94,2 | 94,8      |  | Sekretariat Utama               |      |
| 12.2                           | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama  | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | 12.2                           | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama  | 75                    | Efisien (100%) | -    | -    | -         | Berdasarkan hasil revidu, mulai tahun 2022, indikator ini tidak lagi digunakan pada level Satuan Kerja karena sudah menggunakan indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) | Sekretariat Utama               |      |
|                                | <b>Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana</b> |                |                |                |                |                |                                | <b>Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana</b> |                       |                |      |      |           |  | Biro Hukum dan Organisasi       |      |
|                                | Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya  |                |                |                |                |                |                                | Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Hukum dan Organisasi                           |                       |                |      |      |           |  |                                 |      |

| SEMULA   |  |        |      |      |      |      | MENJADI   |  |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |      |
|--|--|--------|------|------|------|------|---|--|-----------------------|--------|------|------|-----------|------------|--|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator   |  | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator  |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |            |  |      |
|  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |  |                       | 2021   | 2022 | 2023 |           |            |  | 2024 |
| Biro Hukum dan Organisasi  |  |        |      |      |      |      |   |  |                       |        |      |      |           |            |  |      |
| 1  | Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan        | 3.4    | 3.8  | 4.5  | 4.6  | 4.75 | 1   | Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan                      | 4,25                  | 4,38   | 4,5  | 4,63 | 4,75      |            |  |      |
| 2  | Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi            | 4.4    | 4.9  | 5.5  | 5.55 | 5.7  | 2   | Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi                          | 7,37                  | 7,39   | 7,41 | 7,43 | 7,45      |            |  |      |
| 3  | Nilai RB BPOM Penataan tata laksana                        | 4.2    | 4.4  | 4.65 | 4.7  | 4.75 | 3   | Nilai RB BPOM Penataan tata laksana                                      | 5                     | 5,24   | 5,47 | 5,71 | 5,94      |            |  |      |
|  |  |        |      |      |      |      | 4   | Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                      | 5,58                  | 5,67   | 5,76 | 5,85 | 5,94      |            |  |      |
| Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi |  |        |      |      |      |      | Meningkatnya kepuasan masyarakat dan Internal BPOM terhadap kinerja Layanan Biro Hukum dan Organisasi |  |                       |        |      |      |           |            |  |      |
|  |  |        |      |      |      |      | 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi      | 85,3                  | 87     | 88   | 89   | 90        |            |  |      |
| 1  | Indeks pelayanan publik internal Biro Hukum dan Organisasi | 3.55   | 3.6  | 3.65 | 3.7  | 3.75 | 2   | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi | 3,82                  | 3,7    | 3,75 | 3,80 | 3,85      |            | Target lebih rendah dibandingkan realisasi Tahun 2020 karena terdapat perluasan ruang lingkup dengan adanya perubahan OTK baru di Biro |      |

| SEMULA  |   |        |      |      |      |      | MENJADI   |   |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan           | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |      |
|---|---|--------|------|------|------|------|---|---|-----------------------|--------|------|------|-----------|----------------------|--|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator                                      |   | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator                                      |   | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |                      |  |      |
|   |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   |                       | 2021   | 2022 | 2023 |           |                      |  | 2024 |
|   |   |        |      |      |      |      |   |   |                       |        |      |      |           | Hukum dan Organisasi |  |      |
| Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran         |   |        |      |      |      |      | Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran         |   |                       |        |      |      |           |                      |  |      |
| 1   | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan                            | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 1   | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan                            | 100                   | 100    | 100  | 100  | 100       |                      |  |      |
| 2   | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | 79     | 100  | 100  | 100  | 100  | 2   | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | 79                    | 100    | 100  | 100  | 100       |                      |  |      |
| Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di bidang Obat dan Makanan |   |        |      |      |      |      | Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di bidang Obat dan Makanan |   |                       |        |      |      |           |                      |  |      |
| 1   | Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun                          | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  | 1   | Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun                          | 100                   | 100    | 100  | 100  | 100       |                      |  |      |
| Tersedianya advokasi hukum yang efektif                             |   |        |      |      |      |      | Tersedianya advokasi hukum yang efektif                             |   |                       |        |      |      |           |                      |  |      |
| 1   | Persentase Advokasi Hukum yang diselesaikan                                   | 82     | 83   | 84   | 85   | 86   | 1   | Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti                                | 96,43                 | 100    | 100  | 100  | 100       |                      | Target menjadi 100% dengan perubahan DO menjadi Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti. PA/PTx100<br>PA = Permintaan Advokasi yang ditindaklanjuti |      |

| SEMULA   |                                     |        |      |      |      |      | MENJADI   |   |                       |        |       |       | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |  |   |
|--|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|---|---|-----------------------|--------|-------|-------|-----------|------------|---------------------------------|--|---|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator   |                                     | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator  |   | Realis<br>asi<br>2020 | Target |       |       |           |            |                                 |  |   |
|  |                                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   |                       | 2021   | 2022  | 2023  |           |            |                                 | 2024                                   |   |
|  |                                     |        |      |      |      |      |   |   |                       |        |       |       |           |            |                                 | PT = Permintaan Advokasi yang diterima |   |
|  |                                     |        |      |      |      |      | Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informasi, Dokumentasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat |   |                       |        |       |       |           |            |                                 |  |   |
|  |                                     |        |      |      |      |      | 1   | Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti | 99,47                 | 99,2   | 99,4  | 99,6  | 99,8      |            |                                 |  | Target 2021-2022 dibawah realisasi 2020 sehingga target 2021-2024 tetap karena terdapat penambahan responden pada survei kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi Badan POM |
|  |                                     |        |      |      |      |      | 2   | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan              | 91                    | 92,52  | 94,37 | 96,26 | 98,19     |            |                                 |  |   |
|  |                                     |        |      |      |      |      | 3   | Indeks Pelayanan Publik   | 4,48                  | 4,51   | 4,55  | 4,60  | 4,65      |            |                                 |  |   |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi yang optimal |                                     |        |      |      |      |      | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi yang optimal              |   |                       |        |       |       |           |            |                                 |  |   |
| 1  | Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi | 91     | 92   | 93   | 94   | 95   | 1   | Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi                                     | 74,04                 | 85,8   | 86,25 | 87,25 | 88,25     |            |                                 |  | Penurunan Target dikarenakan melihat hasil N-1 dan Hasil Capaian Tahun 2021 dari Inspektorat Utama  |

| SEMULA   |  |        |      |      |      |      | MENJADI  |   |                       |        |       |       |       | Pro<br>PN | Keterangan  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |
|--|--|--------|------|------|------|------|--|---|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-----------|---|---------------------------------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator   |  | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator   |   | Realis<br>asi<br>2020 | Target |       |       |       |           |   |                                 |
|  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   |                       | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  |           |   |                                 |
|  |  |        |      |      |      |      |  |   |                       |        |       |       |       |           | yang diambil adalah nilai konversi dengan rata-rata penilaian Unit Kerja Pusat dan oleh KemenPANRB dibagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2020 sehingga penetapan target disesuaikan kembali dengan cara perhitungan yang dilakukan oleh inspektorat utama. Adapun nilai konversi tahun 2021 sebesar 85,28 |                                 |
| Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal                                  |  |        |      |      |      |      | Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal                                  |   |                       |        |       |       |       |           |   |                                 |
| 1  | Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi | 75     | 77   | 80   | 82   | 85   | 1  | Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi            | 83,36                 | 84,00  | 85,00 | 86,00 | 87,00 |           |   |                                 |
| Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi |  |        |      |      |      |      | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi |   |                       |        |       |       |       |           |   |                                 |
| 1  | Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan | 1.51   | 2    | 2.26 | 2.5  | 3    | 1  | Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi | 0                     | 2      | 2,25  | 2,5   | 3     |           |   |                                 |



| SEMULA   |  |        |      |      |      |      | MENJADI   |  |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana   |      |
|--|--|--------|------|------|------|------|---|--|-----------------------|--------|------|------|-----------|------------|---|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator   |  | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator  |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |            |   |      |
|  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |  |                       | 2021   | 2022 | 2023 |           |            |   | 2024 |
| regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST) |  |        |      |      |      |      |   |  |                       |        |      |      |           |            |   |      |
| 1  | Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST) | 2      | 2    | 2    | 2    | 2    |   |  |                       |        |      |      |           |            |   |      |
| Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama            |  |        |      |      |      |      | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas |  |                       |        |      |      |           |            |   |      |
|  |  |        |      |      |      |      | 1   | Indeks kepuasan media  | 74,02                 | 74     | 74,5 | 75   | 75,5      |            |   |      |
|  |  |        |      |      |      |      | 2   | Indeks opini publik BPOM   | 79,6                  | 78     | 79   | 80   | 81        |            | Target 2021-2022 dibawah realisasi 2020 karena terdapat penambahan jumlah responden di tahun 2021 sebesar 6,67% dari tahun 2020 |      |
| 1  | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan  | 3.82   | 3.84 | 3.85 | 3.87 | 3.88 | 3   | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro | 3,82                  | 3,84   | 3,85 | 3,87 | 3,88      |            |   |      |



| SEMULA                         |  |        |      |      |      |      | MENJADI  |  |                       |        |       |       | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |      |
|--------------------------------|--|--------|------|------|------|------|--|--|-----------------------|--------|-------|-------|-----------|------------|---------------------------------|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator   |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |       |       |           |            |                                 |      |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |                       | 2021   | 2022  | 2023  |           |            |                                 | 2024 |
| 1                              | Jumlah dokumen Kerja Sama Badan POM  | 84     | 87   | 90   | 95   | 100  |  |  |                       |        |       |       |           |            |                                 |      |
|                                |  |        |      |      |      |      | Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan                    |  |                       |        |       |       |           |            |                                 |      |
|                                |  |        |      |      |      |      | 1  | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media              | 99,84                 | 99,82  | 99,84 | 99,85 | 99,86     |            |                                 |      |
|                                |  |        |      |      |      |      | 2  | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | 53,17                 | 65     | 66    | 67    | 68        |            |                                 |      |
|                                |  |        |      |      |      |      | 3  | Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting    | 80                    | 80     | 95    | 95,5  | 96        |            |                                 |      |
|                                | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Biro Kerja Sama yang Optimal                        |        |      |      |      |      | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal                        |  |                       |        |       |       |           |            |                                 |      |
| 1                              | Indeks RB Biro Kerja Sama  | 85     | 89   | 93   | 94   | 95   | 1  | Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas                        | 68,57                 | 75,0   | 78,5  | 82    | 85,5      |            |                                 |      |
|                                | Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama yang berkinerja optimal                                  |        |      |      |      |      | Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal                                  |  |                       |        |       |       |           |            |                                 |      |
| 1                              | Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama   | 75     | 77   | 80   | 82   | 85   | 1  | Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas       | 79,67                 | 81     | 82    | 83    | 84        |            |                                 |      |
|                                | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama |        |      |      |      |      | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas |  |                       |        |       |       |           |            |                                 |      |
| 1                              | Indeks pengelolaan data  | 1.51   | 2    | 2.26 | 2.5  | 3    | 1  | Indeks pengelolaan data dan informasi                      | 0                     | 2      | 2,25  | 2,5   | 3         |            |                                 |      |

| SEMULA   |  |               |               |               |               |               | MENJADI  |  |                       |               |               |               |               | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator   |  | Target        |               |               |               |               | Sasaran<br>Strategis/Indikator   |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target        |               |               |               |           |            |                                 |
|  |  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |  |  |                       | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |           |            |                                 |
|  | dan informasi Biro Kerja Sama  |               |               |               |               |               |  | Biro Kerja Sama dan Humas  |                       |               |               |               |               |           |            |                                 |
| Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama Secara Akuntabel   |  |               |               |               |               |               | Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas Secara Akuntabel   |  |                       |               |               |               |               |           |            |                                 |
| 1  | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama  | Efisien (90%) | Efisien (90%) | Efisien (90%) | Efisien (90%) | Efisien (90%) | 1  | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas  | Efisien (90%)         | Efisien (90%) | Efisien (90%) | Efisien (90%) | Efisien (90%) |           |            |                                 |
| <b>Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan</b> |  |               |               |               |               |               | <b>Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan</b> |  |                       |               |               |               |               |           |            | Biro Perencanaan dan Keuangan   |
| Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BPOM di lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan   |  |               |               |               |               |               | Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BPOM di lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan   |  |                       |               |               |               |               |           |            |                                 |
| 1  | Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas  | 4.9           | 5.25          | 5.6           | 5.66          | 5.7           | 1  | Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas  | 3,96                  | 4,22          | 4,48          | 4,74          | 5             |           |            |                                 |
| 2  | Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM | 73.25         | 76.73         | 81.08         | 81.93         | 82.8          | 2  | Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM | 70,67                 | 72,44         | 73,33         | 74,22         | 75,14         |           |            |                                 |
| 3  | Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM   | 93            | 94            | 95            | 96            | 97            | 3  | Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM   | 91,27                 | 94            | 95            | 96            | 97            |           |            |                                 |
| 4  | Nilai Indikator kinerja  | 94.24         | 94.87         | 95.22         | 95.57         | 95.92         | 4  | Nilai Indikator kinerja pelaksanaan  | 100                   | 94,87         | 95,22         | 95,57         | 95,92         |           |            |                                 |







| SEMULA                         |  |        |      |      |      | MENJADI                        |  |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana   |      |
|--------------------------------|--|--------|------|------|------|--------------------------------|--|-----------------------|--------|------|------|-----------|------------|---|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |            |   |      |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |                                |  |                       | 2024   | 2021 | 2022 |           |            |   | 2023 |
|                                |  |        |      |      |      |                                | penganggaran,<br>monev dan<br>pelaporan kinerja,<br>pelaksanaan<br>anggaran dan<br>pelaporan keuangan<br>BPOM yang<br>diselesaikan tepat<br>waktu dan sesuai<br>standar  |                       |        |      |      |           |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      | 2                              | Persentase dokumen<br>perencanaan,<br>penganggaran,<br>monev dan<br>pelaporan kinerja,<br>pelaksanaan<br>anggaran dan<br>pelaporan keuangan<br>SETTAMA yang<br>diselesaikan tepat<br>waktu dan sesuai<br>standar | 100                   | 100    | 100  | 100  | 100       |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      |                                | Meningkatnya kualitas<br>layanan dukungan strategis<br>Pimpinan  |                       |        |      |      |           |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1                              | Tingkat<br>keberhasilan<br>koordinasi dalam<br>layanan dukungan<br>strategis Pimpinan  | 85,14                 | 83     | 83,5 | 84   | 84,5      |            | Terdapat<br>penyesuaian<br>ruang lingkup<br>pengukuran<br>dimana pada<br>tahun 2020 belum<br>memasukkan<br>kinerja monev<br>program strategis<br>pimpinan.<br>Berdasarkan hasil<br>exercise dengan<br>tools baru di |      |

| SEMULA                         |  |        |      |      |      |      | MENJADI                        |  |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan  | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |      |
|--------------------------------|--|--------|------|------|------|------|--------------------------------|--|-----------------------|--------|------|------|-----------|---|---------------------------------|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |   |                                 |      |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                                |  |                       | 2021   | 2022 | 2023 |           |   |                                 | 2024 |
|                                |  |        |      |      |      |      |                                |  |                       |        |      |      |           | tahun 2021 (TW3) menghasilkan baseline 83,06.   |                                 |      |
|                                | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal             |        |      |      |      |      |                                | Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal             |                       |        |      |      |           |   |                                 |      |
| 1                              | Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan  | 85     | 89   | 93   | 94   | 95   | 1                              | Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan  | 75,93                 | 72,2   | 74,7 | 77,2 | 79,7      | Perhitungan target disesuaikan dengan perhitungan nilai konversi 2021 dari Insspektorat Utama yaitu sebesar 72,18 |                                 |      |
|                                | Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang Berkinerja Optimal                                  |        |      |      |      |      |                                | Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang Berkinerja Optimal                                  |                       |        |      |      |           |   |                                 |      |
| 1                              | Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan   | 75     | 77   | 80   | 82   | 85   | 1                              | Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan   | 80,48                 | 81     | 82   | 83   | 84        |   |                                 |      |
|                                | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan |        |      |      |      |      |                                | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan |                       |        |      |      |           |   |                                 |      |
| 1                              | Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan                                    | 1.51   | 2    | 2.26 | 2.5  | 3    | 1                              | Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan                                    | 0,75                  | 2      | 2,25 | 2,5  | 3         |   |                                 |      |
|                                | Terkelolanya Keuangan Biro Perencanaan dan   |        |      |      |      |      |                                | Terkelolanya Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel                                   |                       |        |      |      |           |   |                                 |      |

| SEMULA  |   |                |                |                |                |                | MENJADI                        |   |                   |                |                |                | Pro<br>PN      | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana   |      |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator  |   | Target         |                |                |                |                | Sasaran<br>Strategis/Indikator |   | Realisasi<br>2020 | Target         |                |                |                |            |   |      |
|   |   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |                                |   |                   | 2021           | 2022           | 2023           |                |            |   | 2024 |
| Keuangan secara Akuntabel   |   |                |                |                |                |                |                                |   |                   |                |                |                |                |            |   |      |
| 1   | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | 1                              | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan | Efisien (100%)    | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) |            |   |      |
| <b>Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan</b>                           |   |                |                |                |                |                |                                |   |                   |                |                |                |                |            | Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan (OTK Lama)   |      |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup Biro Humas dan DSP |   |                |                |                |                |                |                                |   |                   |                |                |                |                |            |   |      |
| 1   | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi | 79.5           | 83             | 86             | 89             | 92             |                                |   |                   |                |                |                |                |            | Indikator dipindahkan pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana |      |
| 2   | Indeks kepuasan media   | 73             | 73.5           | 74             | 74.5           | 75             |                                |   |                   |                |                |                |                |            | Indikator dipindahkan pada kegiatan Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan   |      |

| SEMULA  |  |        |      |       |       |       | MENJADI                        |  |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |      |  |
|---|--|--------|------|-------|-------|-------|--------------------------------|--|-----------------------|--------|------|------|-----------|------------|---------------------------------|------|--|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator  |  | Target |      |       |       |       | Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |            |                                 |      |  |
|   |  | 2020   | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |                                |  |                       | 2021   | 2022 | 2023 |           |            |                                 | 2024 |  |
|   |  |        |      |       |       |       |                                |  |                       |        |      |      |           |            |                                 |      |  |
| 3   | Indeks opini publik BPOM   | 66     | 67   | 68    | 69    | 70    |                                |  |                       |        |      |      |           |            |                                 |      | Hubungan Masyarakat BPOM<br>Indikator dipindahkan pada kegiatan Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM |
| Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro HDSP |  |        |      |       |       |       |                                |  |                       |        |      |      |           |            |                                 |      |  |
| 1   | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Humas dan DSP | 3.63   | 3.66 | 3.68  | 3.71  | 3.74  |                                |  |                       |        |      |      |           |            |                                 |      |  |
| Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik                      |  |        |      |       |       |       |                                |  |                       |        |      |      |           |            |                                 |      |  |
| 1   | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media  | 99.59  | 99.6 | 99.61 | 99.62 | 99.63 |                                |  |                       |        |      |      |           |            |                                 |      | Indikator dipindahkan pada kegiatan Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM                             |
| 2   | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti              | 95     | 95.5 | 96    | 96.5  | 97    |                                |  |                       |        |      |      |           |            |                                 |      | Indikator dipindahkan pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-   |



| SEMULA  |   |               |               |               |               |               | MENJADI                        |  |                       |        |      | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |      |      |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------|------|-----------|------------|---------------------------------|------|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator  |   | Target        |               |               |               |               | Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |           |            |                                 |      |      |
|   |   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |                                |  |                       | 2021   | 2022 |           |            |                                 | 2023 | 2024 |
| Humas dan DSP yang optimal  |   |               |               |               |               |               |                                |  |                       |        |      |           |            |                                 |      |      |
| 1   | Indeks RB Biro Humas dan DSP  | 85            | 89            | 93            | 94            | 95            |                                |  |                       |        |      |           |            |                                 |      |      |
| Terwujudnya SDM Biro Humas dan DSP yang berkinerja optimal                                  |   |               |               |               |               |               |                                |  |                       |        |      |           |            |                                 |      |      |
| 1   | Indeks Profesionalitas ASN di Biro Humas dan DSP                      | 75            | 77            | 80            | 82            | 85            |                                |  |                       |        |      |           |            |                                 |      |      |
| Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Humas dan DSP |   |               |               |               |               |               |                                |  |                       |        |      |           |            |                                 |      |      |
| 1   | Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Humas dan DSP yang optimal | 1.51          | 2             | 2.26          | 2.5           | 3             |                                |  |                       |        |      |           |            |                                 |      |      |
| Terkelolanya keuangan Biro Humas dan DSP secara akuntabel                                   |   |               |               |               |               |               |                                |  |                       |        |      |           |            |                                 |      |      |
| 1   | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Humas dan DSP              | Efisien (88%) | Efisien (88%) | Efisien (88%) | Efisien (88%) | Efisien (88%) |                                |  |                       |        |      |           |            |                                 |      |      |
| <b>Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM</b>        |   |               |               |               |               |               |                                |  |                       |        |      |           |            |                                 |      |      |
| Meningkatnya capaian RB BPOM di lingkup Biro Umum dan SDM sesuai roadmap RB BPOM            |   |               |               |               |               |               |                                |  |                       |        |      |           |            |                                 |      |      |





| SEMULA   |   |                |                |                |                |                | MENJADI   |   |                       |              |              | Pro<br>PN    | Keterangan   | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana |          |      |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator   |   | Target         |                |                |                |                | Sasaran<br>Strategis/Indikator                                    |   | Realis<br>asi<br>2020 | Target       |              |              |              |                                 |          |      |
|  |   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |   |   |                       | 2021         | 2022         |              |              |                                 | 2023     | 2024 |
| Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Umum dan SDM |   |                |                |                |                |                |   |   |                       |              |              |              |              |                                 |          |      |
| 1  | Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum dan SDM yang optimal | 1.51           | 2              | 2.26           | 2.5            | 3              |   |   |                       |              |              |              |              |                                 |          |      |
| Terkelolanya Keuangan di Biro Umum dan SDM secara Akuntabel                                |   |                |                |                |                |                |   |   |                       |              |              |              |              |                                 |          |      |
| 1  | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum dan SDM                 | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) |   |   |                       |              |              |              |              |                                 |          |      |
|  |   |                |                |                |                |                | <b>Pengelolaan Sumber Daya Manusia</b>                            |   |                       |              |              |              |              |                                 | Biro SDM |      |
|  |   |                |                |                |                |                | Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro SDM |   |                       |              |              |              |              |                                 |          |      |
|  |   |                |                |                |                |                | 1   | Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM             | 4,67                  | 5,13         | 5,59         | 6,04         | 6,5          |                                 |          |      |
|  |   |                |                |                |                |                | 2   | Indeks Sistem Merit                                     | Lev.4 (0,88)          | Lev.4 (0,88) | Lev.4 (0,89) | Lev.4 (0,89) | Lev.4 (0,90) |                                 |          |      |
|  |   |                |                |                |                |                | Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM     |   |                       |              |              |              |              |                                 |          |      |
|  |   |                |                |                |                |                | 1   | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM | -                     | 3,41         | 3,44         | 3,47         | 3,5          |                                 |          |      |
|  |   |                |                |                |                |                | Meningkatnya Pengelolaan Karier Pegawai BPOM                      |   |                       |              |              |              |              |                                 |          |      |

| SEMULA                         |  |        |      |      |      | MENJADI  |  |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |      |
|--------------------------------|--|--------|------|------|------|--|--|-----------------------|--------|------|------|-----------|------------|--|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator                                   |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |            |  |      |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |                       | 2024   | 2021 | 2022 |           |            |  | 2023 |
|                                |  |        |      |      |      | 1  | Persentase ASN B POM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir | 92,73                 | 74     | 75   | 77   | 79        |            | Penurunan target di Tahun 2021 dibandingkan realisasi 2020 disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi (perubahan structural menjadi fungsional) dimana penilaian angka kredit menjadi salah satu persyaratan untuk peningkatan kariernya sehingga memerlukan adaptasi. |      |
|                                |  |        |      |      |      | Meningkatnya Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai B POM |  |                       |        |      |      |           |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1  | Persentase ASN B POM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik        | 99,94                 | 99     | 92   | 93   | 94        |            | Penurunan target di Tahun 2022 dibandingkan realisasi 2020 disebabkan adanya implementasi peraturan manajemen ASN terbaru di mana terdapat peningkatan standar kriteria baik   |      |

| SEMULA                         |  |        |      |      |      | MENJADI                        |   |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |      |
|--------------------------------|--|--------|------|------|------|--------------------------------|---|-----------------------|--------|------|------|-----------|------------|--|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator |   | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |            |  |      |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |                                |   |                       | 2024   | 2021 | 2022 |           |            |  | 2023 |
|                                |  |        |      |      |      | 2                              | Indeks Kesejahteraan Pegawai  | 3,05                  | 3,05   | 3,06 | 3,07 | 3,08      |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      |                                | Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Data ASN BPOM                          |                       |        |      |      |           |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1                              | Persentase ABK yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan (2021)                | -                     | 70     | -    | -    | -         |            | Indikator ini dihapus karena sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sehingga diubah menjadi indikator Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik |      |
|                                |  |        |      |      |      | 2                              | Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik (2022-2024) |                       | -      | 72   | 74   | 76        |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | 3                              | Persentase Data ASN yang dimutakhirkan (2021)   | -                     | 80     | -    | -    | -         |            | Indikator ini dihapus karena sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sehingga diubah menjadi indikator Persentase layanan kepegawaian  |      |



| SEMULA                         |  |        |      |      |      | MENJADI  |  |                       |        |       |       | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana   |      |
|--------------------------------|--|--------|------|------|------|--|--|-----------------------|--------|-------|-------|-----------|------------|---|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator                                 |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |       |       |           |            |   |      |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |                       | 2024   | 2021  | 2022  |           |            |   | 2023 |
|                                |  |        |      |      |      | B POM di Lingkup Biro Umum                                     |  |                       |        |       |       |           |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1  | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan                         | 85,71                 | 90,00  | 91,00 | 92,00 | 93,00     |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      | 2  | Nilai Pengelolaan BMN                                    | 78,99                 | 80     | -     | -     | -         |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      | 3  | Indeks Pengelolaan Aset                                  |                       | -      | 2,93  | 2,95  | 2,98      |            | Berdasarkan surat dari DJKN terdapat perubahan indikator pengelolaan BMN menjadi indeks pengelolaan asset sehingga merubah tools penilaian Satker                                   |      |
|                                |  |        |      |      |      | 3  | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa             | -                     | 56     | 72    | 74    | 80        |            | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa dapat mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi 58 Satker di lingkungan BPOM memperhitungkan 5 aspek penilaian |      |
|                                |  |        |      |      |      | Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro Umum |  |                       |        |       |       |           |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1  | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum | 3,43                  | 3,73   | 3,75  | 3,78  | 3,81      |            |   |      |

| SEMULA                         |  |        |      |      |      | MENJADI   |  |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana   |      |
|--------------------------------|--|--------|------|------|------|---|--|-----------------------|--------|------|------|-----------|------------|---|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator  |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |            |   |      |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |   |  |                       | 2024   | 2021 | 2022 |           |            |   | 2023 |
|                                |  |        |      |      |      | Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana dan Kearsipan BPOM yang Optimal       |  |                       |        |      |      |           |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1   | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan | 97,40                 | 97     | 100  | 100  | 100       |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      | 2   | Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan      | 85,71                 | 87     | 88   | 89   | 90        |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara |  |                       |        |      |      |           |            |   |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1   | Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik   | 88,40                 | 91     | 50   | 55   | 60        |            | Berdasarkan surat dari DJKN terdapat perubahan indikator pengelolaan BMN menjadi indeks pengelolaan asset sehingga merubah tools penilaian Satker |      |
|                                |  |        |      |      |      | 2   | Persentase Satker yang mengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perencanaan                              | -                     | 60     | -    | -    | -         |            | Indikator ini dihapus mulai tahun 2022 karena adanya elektronisasi pengelolaan  |      |



| SEMULA                         |  |        |      |      |      | MENJADI   |  |                   |                |               |               | Pro<br>PN     | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana  |      |
|--------------------------------|--|--------|------|------|------|---|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator  |  | Realisasi<br>2020 | Target         |               |               |               |            |  |      |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |   |  |                   | 2024           | 2021          | 2022          |               |            |  | 2023 |
|                                |  |        |      |      |      | Meningkatnya Kualitas Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan |  |                   |                |               |               |               |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1   | Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan | -                 | 75             | 86            | 88            | 90            |            | Berdasarkan hasil survey Tingkat Keberhasilan Koordinasi dalam Layanan Keprotokolan dan Kesekretariatan Pimpinan dinilai dari 4 (empat) kriteria penilaian |      |
|                                |  |        |      |      |      | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum yang Optimal             |  |                   |                |               |               |               |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1   | Indeks RB Biro Umum  | 79,99             | 82,2           | 83,2          | 84,2          | 85,2          |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | Terwujudnya SDM Biro Umum yang Berkinerja Optimal                       |  |                   |                |               |               |               |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1   | Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum   | 72,40             | 74             | 75            | 76            | 77            |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | Menguatnya Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Umum  |  |                   |                |               |               |               |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1   | Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum   | -                 | 2              | 2,25          | 2,5           | 3             |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | Terkelolanya Keuangan di Biro Umum secara Akuntabel                     |  |                   |                |               |               |               |            |  |      |
|                                |  |        |      |      |      | 1   | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum  | -                 | Efisien (100%) | Efisien (90%) | Efisien (91%) | Efisien (92%) |            | Target tahun 2022-2024 disesuaikan berdasarkan   |      |

| SEMULA                         |  |        |      |      |      | MENJADI                        |  |                       |        |      |      | Pro<br>PN | Keterangan | Unit<br>Organisasi<br>Pelaksana                     |      |
|--------------------------------|--|--------|------|------|------|--------------------------------|--|-----------------------|--------|------|------|-----------|------------|---|------|
| Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Target |      |      |      | Sasaran<br>Strategis/Indikator |  | Realis<br>asi<br>2020 | Target |      |      |           |            |   |      |
|                                |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |                                |  |                       | 2024   | 2021 | 2022 |           |            |   | 2023 |
|                                |  |        |      |      |      |                                |  |                       |        |      |      |           |            | realisasi triwulan<br>1-3 tahun 2021<br>sebesar 80% |      |

## **F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### 1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra Sekretariat Utama BPOM dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja Sekretariat Utama BPOM yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran Sekretariat Utama BPOM serta sebagai upaya dukungan Sekretariat Utama terhadap penyesuaian berbagai kebijakan, strategi dan target kinerja BPOM sebagaimana tertuang dalam Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024.
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra Sekretariat Utama yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra Sekretariat Utama BPOM masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024. Berbagai penyesuaian/reviu yang dilakukan ditekankan pada aspek peningkatan kualitas perencanaan kinerja dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan realisasi kinerja tahun 2020.

### 2. Rekomendasi

- a. Hasil reviu Renstra Sekretariat Utama BPOM 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Sekretariat Utama BPOM serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Sekretariat Utama BPOM.
- b. Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan Sekretariat Utama BPOM dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan agar mengacu pada hasil reviu Renstra Sekretariat Utama ini.

- 85 -  
BAB III  
PENUTUP

Renstra Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra Sekretariat Utama BPOM tersebut. Reviu Renstra Sekretariat Utama BPOM dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja Sekretariat Utama BPOM sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja. Reviu Renstra Sekretariat Utama BPOM juga dilakukan sebagai upaya dukungan Sekretariat Utama terhadap penyesuaian berbagai kebijakan, strategi dan target kinerja BPOM sebagaimana tertuang dalam Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 yang harus dijaga konsistensi dan keselarasannya dengan Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra Sekretariat Utama BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan pada Unit Organisasi di Lingkup Sekretariat Utama BPOM agar memperhatikan hasil reviu Renstra Sekretariat Utama BPOM. Melalui reviu Renstra Sekretariat Utama BPOM ini, diharapkan Sekretariat Utama BPOM terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi dan misi BPOM.

PLT. SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



ELIN HERLINA